

**ANALISIS UPAYA PEMERINTAH KAMBOJA DALAM MENANGANI
PERDAGANGAN MANUSIA 2015 – 2020**

SKRIPSI



Oleh:

NURUL FAOIRIAH

18323085

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021/2022

**ANALISIS UPAYA PEMERINTAH KAMBOJA DALAM MENANGANI
PERDAGANGAN MANUSIA 2015 – 2020
SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NURUL FAOIRIAH

18323085

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS UPAYA PEMERINTAH KAMBOJA DALAM MENANGANI
PERDAGANGAN MANUSIA 2015 – 2020**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

18/5/20222

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Hangga Fathana, S.IP.,B.Int.,St.,MA

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Hasbi Aswar S.IP., M.A., P.hD
- 2 Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si
- 3 Karina Utami Dewi, S.IP., M.A

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertai, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 1 Mei 2022.



Nurul Faqiriah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian	13
1.8.2 Subjek Penelitian	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	14
1.8.4 Proses Penelitian	15
1.9 Sistematika Penulisan	16
BAB 2	17
PERDAGANGAN MANUSIA DI KAMBOJA	17
2.1 Penyebab Perdagangan Manusia di Kamboja	17
2.2 Perdagangan Manusia di Domestik Kamboja 2015 – 2020	18
2.3 Perdagangan Manusia Lintas Batas	23
2.4 Upaya Pemerintah Kamboja dalam Menangani Perdagangan Manusia di Level Domestik	28
2.5 Upaya Pemerintah Kamboja dalam Menangani Perdagangan Manusia melalui Kerja Sama Internasional	30
BAB 3	34
ANALISIS UPAYA KAMBOJA DALAM MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA 2015-2020	34
3.1 Upaya Domestik Kamboja dalam Menangani Perdagangan Manusia melalui Peningkatan Keamanan Individu dan Pencegahan	34

3.2 Upaya Kamboja Menangani Perdagangan Manusia melalui MLATs	46
BAB 4	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Rekomendasi	54
DAFTAR PUSTAKA	56



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Diagram Rata-rata Jumlah Pekerja Anak Dibawah Umur 2015-2020.....	19
Tabel 2. 2 Jumlah Penangkapan Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak 2015-2019	21



DAFTAR SINGKATAN

IOM	: International Organization of Migration
ACTIP	: ASEAN Convention Against Trafficking
ADB	: Asian Development Bank
APLE	: Action Pour Les Enfants
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
COMMIT	: Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking
CRC	: Convention on the Rights of the Child
FAO	: Food and Agriculture Organization
ICAC	: Internet Crimes Against Children
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MLATs	: Mutual Legal Assistance Treaty
MoU	: Memorandum of Understanding
NCCT	: National Committee For Counter Trafficking
OCSE	: Online Child Sexual Exploitation
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa

ABSTRAK

Perang saudara yang terjadi di Kamboja berakhir pada 1998 ketika pemerintah Kamboja mengeluarkan kebijakan *win-win solution*. Namun, berakhirnya perang saudara ini membuat Kamboja menghadapi permasalahan baru di bidang sosial dan ekonomi. Permasalahan sosial yang terjadi di Kamboja membuat warga Kamboja melakukan migrasi dari desa ke kota hingga ke mancanegara. Akan tetapi migrasi warga Kamboja membuat mereka rentan menjadi korban perdagangan manusia. Oleh karena itu dalam menangani perdagangan manusia pemerintah Kamboja telah membuat berbagai kebijakan peningkatan keamanan individu dan pencegahan di level domestik. Di level internasional pemerintah Kamboja juga melakukan kerjasama internasional melalui MLATs.

Kata Kunci : Kamboja, Perdagangan manusia, keamanan individu, pencegahan, MLATs

Abstrack

The civil war that occurred in Cambodia ended in 1998 when the Cambodian government issued a win-win solution policy. However, the end of this civil war made Cambodia face new problems in the social and economic fields. Social problems that occur in Cambodia make Cambodians migrate from villages to cities to foreign countries. However, the migration of Cambodians makes them vulnerable to being victims of human trafficking. Therefore, in dealing with human trafficking, the Cambodian government has made various policies to increase individual security and prevention at the domestic level. At the international level, the Cambodian government also conducts international cooperation through MLATs.

Keyword : Cambodia, human trafficking, individual security, prevention, MLATs

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut UN Convention Against Transnational Organized Crime perdagangan manusia merupakan perekrutan, perdagangan, menyembunyian atau penerimaan orang melalui ancaman atau kekerasan dengan tujuan eksploitasi seksual, perbudakan dan pengambilan organ tubuh (UNODC 2004). Pada 2015 tercatat sebanyak 7.000 kasus perdagangan manusia global yang telah ditangani oleh IOM (International Organization for Migration) dan 1525 dari total korban perdagangan manusia berasal dari negara ASEAN dimana 88,2% korbannya merupakan perempuan dan 7% anak-anak (IOM 2016). Dari data ini dapat dilihat bahwasanya negara ASEAN tengah menghadapi permasalahan serius berupa perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan perbudakan modern dengan cara eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dengan upah rendah, serta kawin paksa.

Kamboja merupakan negara pengirim, transit, dan penerima perdagangan manusia. Selain itu permasalahan sosial juga berdampak pada terjadinya perdagangan manusia di Kamboja. Meskipun pertumbuhan ekonomi dan kemajuan infrastruktur terus meningkat di Kamboja, akan tetapi laporan Forbes menyatakan bahwa Kamboja merupakan negara termiskin di Asia, hal ini terjadi karena kurangnya kesempatan pendidikan, korupsi yang merajalela, ketimpangan sosial dan kesempatan kerja yang terbatas (Forbes n.d.).

Kamboja resmi bergabung ke dalam ASEAN pada 30 April 1999, namun diantara negara anggota ASEAN yang lain Kamboja termasuk negara yang tertinggal dari segi pembangunan. Ketertinggalan pembangunan di Kamboja terjadi karena faktor konflik politik yang terjadi di internal Kamboja yang mempengaruhi angka kemiskinan di Kamboja, secara historis konflik di Kamboja dimulai sejak Maret 1970 ketika Lon Nol melakukan kudeta terhadap pangeran Norodom Sihanouk konflik ini terus berlangsung hingga diadakannya perundingan Paris Peace Agreement dibawah PBB pada Oktober 1991 (Ardiyanti 2017, 49) namun upaya PBB untuk mendamaikan perang saudara yang berlangsung di Kamboja pada saat itu gagal.

Hingga pada akhir 1998 pemerintah Kamboja mengeluarkan kebijakan Win-Win Solution yang mengakhiri perang saudara yang terjadi di Kamboja, sejak 1998 kondisi politik domestik Kamboja menjadi stabil namun disisi lain masyarakat Kamboja menghadapi permasalahan di bidang sosial dan ekonomi, kemiskinan terus mengalami peningkatan, tingkat kesehatan rendah karena keterbatasan dana, tingkat melek huruf rendah serta tingginya kasus HIV dan AIDS yang dialami masyarakat Kamboja (Ardiyanti 2017, 50). Kemiskinan, minimnya akses terhadap kesehatan dan pendidikan masih terjadi di Kamboja sampai saat ini.

keterbatasan akses Pendidikan dan kesempatan kerja membuat orang harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan migrasi antar kota dan negara, tidak sedikit dari mereka menjadi korban eksploitasi seksual, kerja paksa, serta kawin paksa. kebanyakan perdagangan manusia di Kamboja

dilakukan dengan cara eksploitasi seksual, baik di domestik maupun luar negeri (UN-ACT 2014). perdagangan manusia di luar kamboja dilakukan melalui pengiriman pekerja rumah tangga, kawin paksa serta kerja paksa di sektor perikanan, pertanian dan konstruksi pabrik, negara Asia Tenggara dan Asia Timur merupakan tujuan utama pengiriman perdagangan manusia dari Kamboja (U.S Embassy 2015).

Ditingkat domestik perdagangan manusia di Kamboja terjadi di pabrik industri yang mempekerjakan anak dibawah umur, *sex tourism* dan OCSE. Sepanjang 2015-2020 pekerja anak dibawah umur tercatat 74% disektor agrikultur, 16% industri dan 10% service (U.S Department of Labor, n.d). Selain itu pemerintah Kamboja juga berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku *sex tourism* terhadap anak pada 2015-2020 (Borgstrom and Larsson 2020). Selain itu peningkatan pengguna internet yang terjadi di Kamboja juga membuat anak-anak Kamboja rentan menjadi korban OCSE (The ASEAN Post 2019).

Maraknya perdagangan Manusia di Kamboja membuat Kamboja menempati status watch list tier 2 atau negara yang termasuk daftar watch list tier 2 laporan perdagangan manusia pada 2015, status watch list tier 2 terjadi karena Kamboja tidak memenuhi standar minimum perlindungan korban (TVPA). Upaya Kamboja dalam memerangi perdagangan manusia mengalami peningkatan pada 2016, US Department of State memasukan Kamboja ke dalam daftar tier 2, tentu ini menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan 2015 (U.S Embassy 2016). Akan tetapi pada 2020 US Department of

State kembali memasukan Kamboja ke dalam daftar watch list tier 2 (US Department of State 2020).

Pada 2015 tercatat sebanyak 64% dari total penduduk Kamboja memasuki usia kerja, beberapa dari mereka memilih untuk bekerja di Kamboja, namun dorongan untuk mendapatkan upah dan pekerjaan yang lebih layak membuat sebagian besar masyarakat Kamboja melakukan Migrasi, sebanyak 1,6 juta warga Kamboja melakukan migrasi pada 2015 dan Thailand merupakan tujuan utama para Imigran Kamboja (OECD and Cambodia Development Resource Institute 2017). Dari sini dapat dilihat bahwa jaminan kesejahteraan dan kehidupan yang layak di luar Kamboja merupakan penyebab terjadinya migrasi. Pada 2015 Kamboja telah mengirim 52.265 pekerja migran ke Malaysia, dan 115.420 ke Thailand (OECD and Cambodia Development Resource Institute 2017). Pengiriman imigran dari Kamboja dan negara penerima didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak.

Namun, kebanyakan para migran dari Kamboja memilih melakukan migrasi dengan cara ilegal untuk menghemat biaya dan waktu. Melakukan migrasi dengan jalur illegal membuat imigran Kamboja rentan menjadi korban perdagangan manusia. Pada 2015 Thailand melakukan deportasi 67.087 pekerja migran ilegal asal Kamboja (Sukhumvit 2016). Data statistik pemerintah Thailand menyebutkan hanya 12-13% pekerja Kamboja di Thailand yang memiliki dokumen legal (Hatsukano 2017).

Laporan OECD menyatakan pekerja migran Kamboja baik legal maupun ilegal berpotensi menjadi korban perbudakan modern berupa pelecehan, kerja

paksa, pengurangan gaji, serta lembur tanpa mendapat gaji (OECD and Cambodia Development Resource Institute 2017).

Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kamboja karenanya berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kamboja, mulai dari mengontrol irregular migrant, memperketat pengawasan di perbatasan, peningkatan kesejahteraan warga Kamboja, upaya perlindungan korban perdagangan manusia, melakukan kerja sama secara bilateral maupun multilateral dengan berbagai negara melalui pertemuan maupun MoU. Namun permasalahan domestik yang terjadi di Kamboja menghalangi upaya pemberantasan perdagangan manusia.

Keseriusan pemerintah Kamboja untuk menghentikan kasus perdagangan manusia patut dipertanyakan. Hingga 2020 status Kamboja masih dalam status Watchlist tier dua, ini berarti Kamboja masih belum memperhatikan standar perlindungan korban perdagangan manusia (U.S Embassy 2020). Pandemi covid-19 yang terjadi pada awal 2020 membuat Kamboja mengeluarkan kebijakan untuk menutup perbatasan untuk mencegah penyebaran virus covid-19, akan tetapi penutupan perbatasan ini justru membuat Kamboja menghadapi gelombang baru perdagangan manusia, hal ini terjadi karena banyak para pekerja asal Kamboja yang melakukan migrasi dengan jalur ilegal ke Thailand yang membuat mereka rentan menjadi korban perdagangan manusia (Blomberg 2020).

Pada 1996 Kamboja merupakan salah satu negara yang menerapkan undang-undang yang mengatur hukuman perdagangan manusia, namun pada implementasinya penerapan undang-undang ini sulit dilakukan karena terhalang

oleh permasalahan domestik (Keo et al. 2014). Maka dari itu komitmen untuk memerangi masalah perdagangan manusia yang bersifat transnasional perlu adanya kerja sama Bilateral, Multilateral dan regionalisme di kawasan.

Maka dari itu, skripsi ini akan membahas upaya pemerintah Kamboja dalam menangani perdagangan manusia tahun 2015-2020 baik upaya yang dilakukan di dalam, maupun ke luar.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya pemerintah Kamboja dalam menangani perdagangan manusia pada tahun 2015 – 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Kamboja dalam menangani perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan permasalahan global yang saat ini dihadapi oleh semua negara. Karena itu pemerintah Kamboja harus melakukan kerja sama baik di domestik maupun kerja sama internasional. Serta untuk mengetahui seberapa berhasil upaya pemerintah Kamboja dalam memerangi perdagangan manusia pada tahun 2015- 2020, mengingat status Kamboja berdasarkan laporan US Department of state bahwasanya Kamboja pada tahun 2015-2020 masih berada pada status watch list tier dua, dimana Kamboja belum memenuhi Standar minimum korban bahkan kebijakan menutup perbatasan pemerintah Kamboja untuk mencegah pandemi di awal 2020 membuat Kamboja menghadapi gelombang baru perdagangan manusia.

1.4 Cakupan Penelitian

Pada skripsi ini penulis akan berfokus pada kebijakan pemerintah Kamboja dalam menangani perdagangan manusia 2015-2020 dimana pada tahun 2015 sebanyak 64% penduduk Kamboja memasuki usia kerja, dimana 40% diantaranya berusia 15-30 (OECD and Cambodia Development Resource Institute 2017). Tingginya angka usia kerja pada tahun 2015 menyebabkan terjadinya migrasi. Tujuan utama dari para migran adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, seperti yang diketahui bahwa Kamboja merupakan negara Greater Mekong Subregion dimana daerah ini terkenal dengan gap pembangunan yang tinggi.

Migrasi penduduk Kamboja ke daerah perkotaan hingga ke luar negeri justru menyebabkan mereka rentan menjadi korban perdagangan manusia dengan cara eksploitasi buruh, eksploitasi seksual, kerja dengan upah yang minim, hingga kawin paksa. Sepanjang tahun 2015-2020 pemerintah Kamboja telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi perdagangan manusia. Pada dasarnya perdagangan manusia terjadi karena lemahnya kontrol perbatasan, akan tetapi penutupan perbatasan yang dilakukan pemerintah pada 2020 akibat Covid-19 justru memicu gelombang baru perdagangan manusia (Blomberg 2020). Pemerintah Kamboja telah memiliki sejumlah regulasi untuk mengatasi perdagangan manusia, namun kekacauan di kondisi domestik seperti korupsi menjadi sebab sulitnya sejumlah regulasi dijalankan. Namun pemerintah Kamboja juga terus berupaya dengan mengeluarkan kebijakan dalam negeri dan melakukan kerja sama internasional.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan para peneliti. Penulis menggunakan penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dengan Topik penelitian mengenai perdagangan manusia.

Menurut jurnal yang ditulis oleh Betti Rosita Sari pada Tahun 2010 yang berjudul *The Human Trafficking of Cambodian Women and Children for sex Industry: Internal and external case study* membahas tentang penyebab utama perdagangan manusia di Kamboja dan bagaimana respon pemerintah Kamboja untuk memberantas perdagangan manusia. Dalam jurnal tersebut Betti berpendapat bahwa peningkatan kasus perdagangan manusia di Kamboja setiap tahun terjadi karena kemiskinan, kurangnya pendidikan dan korupsi yang terjadi di pemerintahan Kamboja. (Sari 2010, 221)

Menurut jurnal yang ditulis Chenda Keo, dkk pada tahun 2014 yang berjudul *Human Trafficking and moral panic in Cambodia* membahas tentang bagaimana perdagangan manusia beroperasi, berapa pendapatan mereka, dan bagaimana sistem peradilan pidana terhadap aktivitas perdagangan manusia. Dalam jurnal tersebut Chenda Keo, dkk berpendapat bahwasanya korupsi yang terjadi di kepolisian dan pengadilan, lemahnya penegakan hukum dan korupsi merupakan salah satu faktor penyebab maraknya perdagangan manusia (Keo et al. 2014, 205).

Namun, dalam penelitian yang lain, jurnal yang ditulis Peri Anda Habeahan pada tahun 2018 yang berjudul *Kerjasama Amerika Serikat dan Thailand dalam menangani kasus Slavery and Human Trafficking di industri perikanan Thailand 2013-2017* membahas tentang bagaimana kerjasama Amerika Serikat dan Thailand dalam menangani perbudakan dan perdagangan manusia di Industri perikanan Thailand 2013-2017. Dalam jurnal tersebut Habeahan berpendapat bahwa pemerintah Amerika Serikat dan Thailand telah mengeluarkan kebijakan melalui kerjasama bilateral yaitu melalui USAID, Bureau Democracy, Human rights and labor (DRL) dan kolaborasi dalam penanganan korupsi. Selain melalui kerjasama internasional pemerintah Thailand juga bekerjasama dengan NGO. Pada saat yang sama pemerintah Thailand juga memberikan bantuan untuk korban perdagangan manusia di industri perikanan berupa bantuan perlindungan dan tempat tinggal. (Habeahan and Utomo 2018, 907-909).

Jurnal yang ditulis Anggie Pratiwi Putri Yudha pada tahun 2020 yang berjudul *Upaya Indonesia dalam Menanggulangi Human Trafficking di Selat Malaka* membahas tentang bagaimana upaya Indonesia menanggulangi perdagangan manusia di Selat Malaka. Dalam jurnal tersebut Yudha menggunakan 4 konsep strategi melawan perdagangan manusia dengan teori Friesendorf yaitu implementasi, kerjasama, penelitian dan evaluasi. Indonesia telah meratifikasi protokol palermo dan kemudian mengimplementasikannya dalam undang-undang No.21 tahun 2007 dan Indonesia juga telah meratifikasi ACTIV. Selain itu Indonesia melakukan kerjasama MALSINDO, kerjasama

bilateral dengan Amerika Serikat, kerjasama dengan IMO, dan berbagai sektor keamanan namun pada tahap penelitian dan evaluasi Indonesia belum melakukannya. (Yunda 2020, 177-178).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan rendahnya pendapatan, korupsi dan tidak adanya *political will* membuat maraknya perdagangan manusia di Kamboja, oleh karena itu diperlukan adanya upaya dari pemerintah Kamboja baik domestik maupun melalui kerjasama Internasional. Namun, dalam kasus Kamboja belum ada penelitian tentang bagaimana upaya pemerintah Kamboja dalam menangani perdagangan manusia seperti yang dilakukan oleh Indonesia dalam menanggulangi kasus Human trafficking di Selat Malaka maupun kerjasama bilateral seperti yang dilakukan Thailand dan Amerika Serikat dalam menanggulangi perbudakan dan perdagangan manusia pada 2013-2017.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya pemerintah Kamboja dalam menangani perdagangan manusia pada tahun 2015- 2020.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis Upaya Pemerintah Kamboja dalam mengatasi perdagangan manusia 2015-2020 penulis akan mengaitkan konsep Respon Negara Dalam Memerangi Kejahatan Transnasional. Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang merupakan ancaman nasional dan global. Para pelaku kejahatan transnasional umumnya menentang

norma dan institusi dalam negara dengan cara ilegal oleh karena itu dalam melawan kejahatan transnasional diperlukan adanya kerjasama internasional (Picarelli 2008, 462). Pada level domestik kejahatan transnasional berdampak pada kedaulatan negara karena dapat merusak komponen sosial, ekonomi, politik dan militer sebuah negara oleh karena itu dalam melawan kejahatan transnasional negara perlu mengambil kebijakan di level domestik dan kerjasama regional (Picarelli 2008, 463).

Sebagai upaya dalam melawan kejahatan transnasional terutama perdagangan manusia banyak negara telah mengambil langkah melalui kebijakan nasional seperti meningkatkan keamanan individu dan melakukan langkah pencegahan (Picarelli 2008, 464), dalam hal ini pemerintah Kamboja telah melakukan berbagai upaya domestik seperti membuat RAN, memperkuat penegakan hukum, peningkatan akses pendidikan terhadap perempuan, promosi kesetaraan gender.

Selain itu, upaya dalam melawan kejahatan transnasional juga dapat dilakukan melalui kerjasama internasional. Kerjasama antar negara melalui mekanisme regional maupun kerjasama secara bilateral dan multilateral melalui Mutual Legal Assistance Treaty (MLATs) merupakan komponen penting dalam memerangi kejahatan transnasional (Picarelli 2008, 465). Jalannya MLATs disepakati melalui perjanjian bilateral, perjanjian multilateral serta MoU (Indriati 2009, 106). Dalam hal ini MLATs berperan untuk menyesuaikan kode hukum yang berbeda antar negara untuk melakukan kerjasama (Picarelli, 2008, 465). Penyesuaian kode hukum dilakukan melalui kerjasama penyelidikan

bersama, pengumpulan bukti, dan penegakan hukum antar negara yang terlibat (ibid).

Upaya kerjasama bilateral dan multilateral pemerintah Kamboja dalam memerangi perdagangan manusia dapat dilihat melalui kerjasama regional dalam rezim against trafficking yaitu COMMIT (Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking) dimana negara yang tergabung di dalam COMMIT sepakat bekerjasama dalam memerangi perdagangan manusia disamping itu Kamboja juga melakukan penandatanganan MoU untuk memerangi perdagangan manusia dengan berbagai negara seperti Tiongkok dan Malaysia untuk kerjasama dalam melakukan repatriasi, penegakan hukum, pertukaran informasi, peningkatan kerjasama dan sosialisasi sebagai langkah pencegahan.

1.7 Argumen Sementara

Perdagangan manusia di Kamboja telah berlangsung lama. Seiring berjalannya waktu arus perdagangan manusia lintas batas yang terjadi di Kamboja semakin masif. Kamboja merupakan salah satu negara dengan kasus perdagangan manusia tertinggi di ASEAN. Tingginya angka perdagangan manusia ini disebabkan oleh berbagai hal terutama permasalahan ekonomi dan sosial, oleh karena itu banyak warga Kamboja melakukan migrasi ke kota besar maupun ke luar negeri. Namun migrasi masyarakat Kamboja ke kota besar maupun ke luar negeri memicu resiko baru yakni menjadi korban perdagangan manusia. Para korban perdagangan manusia kerap mendapat perlakuan kasar dari

majikan, di gaji rendah dengan jam kerja yang tinggi, eksploitasi seksual, serta perbudakan terhadap anak dibawah umur. Oleh karena itu pemerintah Kamboja mengambil berbagai upaya untuk mengatasi perdagangan manusia maupun sebagai langkah pencegahan pemerintah telah mengambil kebijakan di level domestik dan kerjasama internasional.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan model deskriptif dengan mengangkat kasus perdagangan manusia yang marak terjadi di negara-negara Asia Tenggara dan salah satunya adalah Kamboja yang merupakan negara termiskin di Asia menurut forbes, kemiskinan yang terjadi di Kamboja ini menyebabkan maraknya perdagangan manusia, banyak warga Kamboja menjadi korban perdagangan manusia dengan tujuan mendapatkan upah yang lebih layak. Letak geografis Kamboja di Sub-Mekong region menyebabkan Kamboja menjadi negara pengirim, penerima dan transit. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kamboja dalam menangani perdagangan manusia dan melihat respon upaya pemerintah Kamboja menangani perdagangan manusia melalui kerjasama internasional. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data yang bergantung pada data non- numerik (Bakry 2017, 63-64).

1.8.2 Subjek Penelitian

Isu Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang dapat menjadi ancaman. Perdagangan manusia terjadi karena permasalahan ekonomi, kurangnya lapangan kerja, dan minimnya pendidikan. Di Asia Tenggara perdagangan manusia rentan dilakukan dengan migrasi ilegal melalui perbatasan terutama Kamboja. kasus perdagangan manusia di Kamboja terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kamboja untuk mengatasi perdagangan manusia melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan perempuan. Akan tetapi kasus perdagangan manusia di Kamboja belum menunjukkan penurunan kasus. Upaya mengatasi perdagangan manusia tidak bisa hanya dilakukan Kamboja sendiri mengingat perdagangan manusia merupakan ancaman yang bersifat transnasional oleh karena itu pemerintah Kamboja perlu melakukan kerjasama internasional antar negara baik melalui perjanjian maupun kontrol keamanan di perbatasan.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan sumber dari buku-buku, jurnal, artikel media massa seperti CNN, BBC, The ASEAN post, Phnom Penh Post, google scholar, laporan-laporan dari LSM pemerhati isu perdagangan manusia seperti Ecpat dan situs-situs resmi dari United Nation Children's Emergency Fund (UNICEF) , IOM (International Organization for Migration) ,

The Asia Foundation, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nation Action for Cooperation Against Trafficking (UN-ACT), dan The Global Slavery Index. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder digunakan untuk menganalisis data yang sudah digunakan penelitian lain maupun laporan resmi dari pemerintah untuk menjawab rumusan masalah (Bakry 2017, 67).

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses pengumpulan data, data-data sekunder yang didapat melalui media massa, laporan resmi dari pemerintah Kamboja dan badan PBB serta Global Slavery Index data tersebut akan dianalisis dalam beberapa tahapan yang pertama melihat hasil data yang telah diambil dan yang kedua memperhatikan data yang telah ambil dan kemudian membaca dan mencermati data untuk lebih mudah dipahami dan kemudian dari proses membaca penulis mengambil poin-poin yang sesuai dengan melakukan perbandingan antar satu data dengan yang lain untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Dan setelah itu mengelompokan data menjadi beberapa bagian untuk sub-sub tema untuk dapat dikaitkan dengan penelitian yang diambil dan langkah terakhir adalah mendeskripsikan data yang telah dianalisis dan memasukkannya kedalam penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi empat bab, setiap bab terdiri dari sub-bab.

Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut

A. Bab I : Pendahuluan

Pada bagian bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori serta metode penelitian.

B. Bab II : Perdagangan Manusia di Kamboja

Pada bagian bab kedua penulis akan membahas situasi dan faktor yang melatar belakangi terjadinya perdagangan manusia di Kamboja serta kebijakan yang telah diambil pemerintah Kamboja dalam menangani perdagangan manusia

C. Bab III: Analisis Upaya Kamboja dalam Menangani Perdagangan Manusia 2015-2020.

Pada bagian bab ketiga penulis akan mencoba menjawab rumusan masalah dengan kerangka pemikiran. bab ini membahas upaya Kamboja dalam menangani perdagangan manusia melalui peningkatan keamanan individu dan pencegahan di level domestik dan analisis upaya Kamboja dalam menangani perdagangan manusia melalui MLATs.

D. Bab IV : Penutup

Pada bagian bab keempat penulis akan menyimpulkan dan memberikan rekomendasi.

BAB 2

PERDAGANGAN MANUSIA DI KAMBOJA

2.1 Penyebab Perdagangan Manusia di Kamboja

Kamboja merupakan negara termiskin di Asia, masyarakat Kamboja hidup dibawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari 1 dolar perhari (Kranrattanasuit 2014, 99). Kemiskinan, pendidikan yang rendah dan jebakan hutang merupakan penyebab utama terjadinya perdagangan manusia (Sari 2010, 224-225). Dengan alasan ekonomi dan harapan akan pekerjaan yang layak membuat warga Kamboja melakukan migrasi baik antar kota maupun antar negara.

Dibentuknya GMS (Greater Mekong Subregion) oleh ADB pada 1992 menyebabkan peningkatan integrasi ekonomi GMS, pada saat yang sama peningkatan integrasi ekonomi ini membuat perbatasan negara semakin longgar yang kemudian memicu terjadinya perdagangan manusia lintas batas (Ullah and Hossain 2011, 277). Akan tetapi migrasi warga Kamboja ke kota besar maupun ke mancanegara justru menyebabkan mereka rentan menjadi korban perdagangan manusia. Kebanyakan dari korban dijanjikan oleh agen akan pekerjaan yang layak akan tetapi pada kenyataannya korban justru menjadi korban perbudakan dan eksploitasi.

Masalah akses pendidikan yang tidak merata juga merupakan alasan utama maraknya perdagangan manusia di negara ini, hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta sekolah dasar yakni mencapai 97 persen, namun hanya 57 persen

yang menyelesaikan sekolah hingga jenjang sekolah menengah atas (Borgstrom and Larsson 2020). Jika dilihat dari persentase jumlah akses pendidikan di Kamboja tentu anak-anak dibawah umur yang rentan menjadi korban perdagangan manusia merupakan anak putus sekolah. Banyaknya anak putus sekolah di Kamboja terjadi karena gap pendidikan yang tinggi antara daerah pedesaan dan perkotaan, tercatat sebanyak 50 persen siswa putus sekolah disebabkan oleh tidak adanya sarana transportasi (Bou 2019). Disisi lain permasalahan ekonomi juga membuat para orang tua berhenti menyekolahkan anaknya akibat tidak mampu membayar, sehingga orang tua lebih memilih mempekerjakan anaknya (Kimseng 2015).

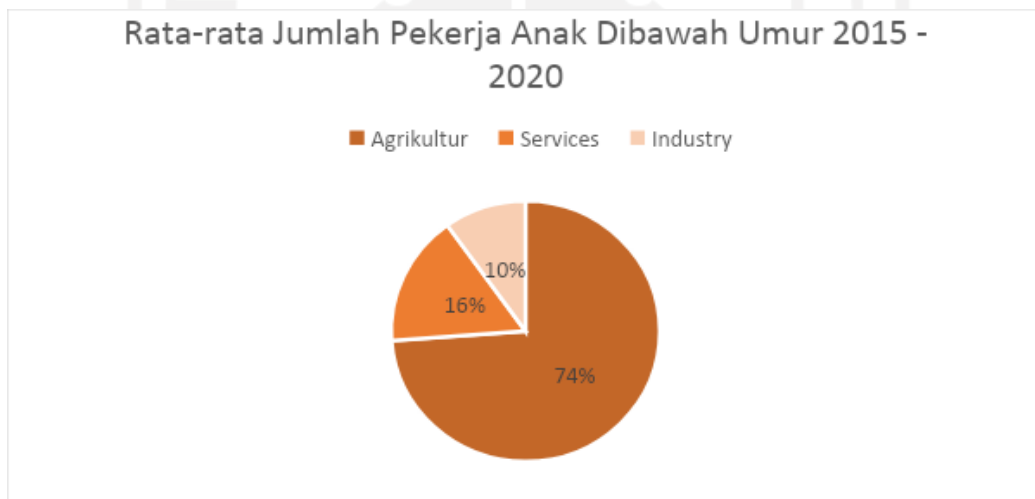
Bahkan, seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin masif menyebabkan munculnya bentuk-bentuk baru perdagangan manusia. Ditengah meningkatnya perdagangan manusia berupa eksploitasi seksual, kerja paksa terhadap anak dibawah umur, perbudakan, migrasi ilegal pada saat yang sama Kamboja juga menghadapi maraknya eksploitasi seksual secara online dan meningkatnya wisata seks.

2.2 Perdagangan Manusia di Domestik Kamboja 2015 – 2020

Pada 2015 terdapat 15.000 hingga 20.000 pekerja anak yang rentan terhadap eksploitasi seksual (Baury and Varrella 2018). Pada tahun 1999 Kamboja telah meratifikasi konvensi ILO No 138 yang menyatakan bahwasanya usia minimum pekerja yaitu 15 tahun, disamping itu pada 2007 Kamboja juga telah meratifikasi konvensi ILO No 182 mengenai pelarangan dan tindakan

segera penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (ILO n.d.). Namun, pada kenyataannya banyak pekerja anak di Kamboja berusia dibawah 15 tahun. Hal ini dapat dilihat dari data yang dipublikasi oleh UNESCO pada 2015 yang menunjukkan persentase anak-anak yang bekerja berdasarkan sektor di usia 5-14 yakni sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Diagram Rata-rata Jumlah Pekerja Anak Dibawah Umur 2015-2020



Sumber : Laporan US Department of Labor 2015 - 2020, data diolah ulang.

Selain kerja paksa terhadap anak dibawah umur perdagangan manusia di Kamboja juga terjadi melalui eksploitasi seksual anak dalam pariwisata. Menurut United Nations World Tourism Organization sex tourism didefinisikan sebagai perjalanan wisata yang bertujuan untuk melakukan hubungan komersial antara turis dan penduduk di tempat tujuan (Grounchy and Campus 2015). Kamboja merupakan negara tujuan wisata seks dari mancanegara, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pekerja seks perempuan yang ada di berbagai tempat wisata di

Kamboja seperti Siem Reap, pintu gerbang Kuil Angkor, Phnom Penh, dan Sihanoukville (Domborwski 2015).

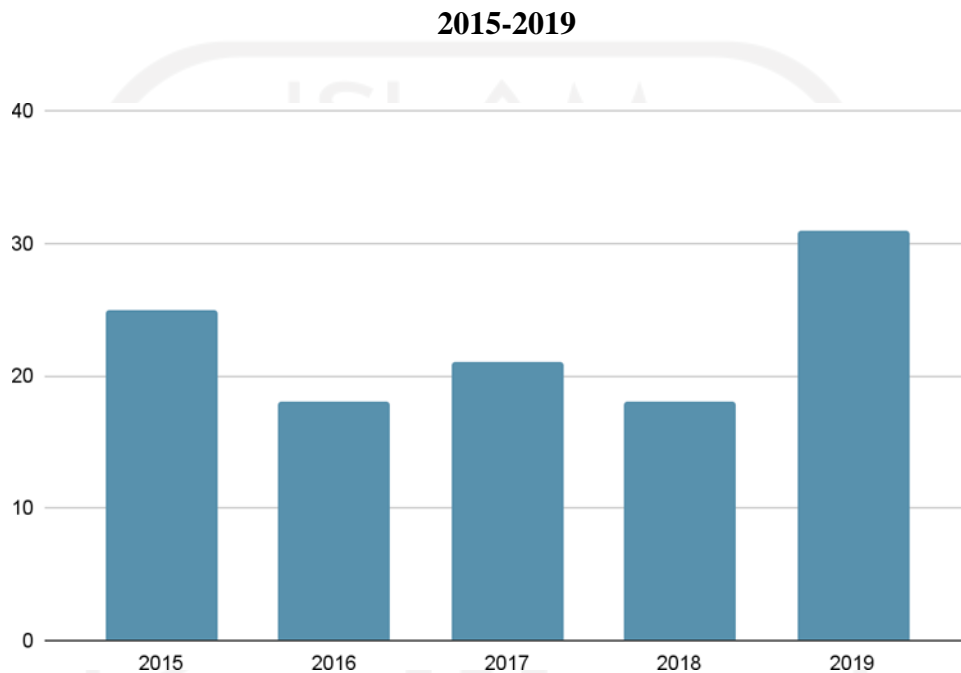
Adanya *free trade zone* di Kamboja juga telah memicu adanya urbanisasi penduduk ke pusat kota Kamboja, urbanisasi ini diharapkan menjadi peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan meningkatkan ekonomi, akan tetapi pada kenyataannya *free trade zone* menyebabkan kerja paksa dan eksploitasi seksual terhadap anak yang tinggal dan bekerja di pusat kota (Baur and Varrella 2018). Industri eksploitasi seksual anak dalam pariwisata terus mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena harga pekerja seks di Kamboja hanya dibayar 20 hingga 30 dollar, tentu jauh lebih murah jika dibandingkan dengan Thailand (Domborwski 2015).

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kamboja mengalami peningkatan signifikan, pada tahun 2018 tercatat sebanyak 6,2 juta turis mengunjungi Kamboja, jumlah ini tentu jauh meningkat lebih dari sepuluh kali lipat jika dibandingkan dengan kunjungan turis ke Kamboja pada tahun 2000 yang hanya mencapai 500.000 wisatawan (Borgstrom and Larsson 2020).

Peningkatan jumlah wisatawan asing yang datang ke Kamboja berpengaruh pada eksploitasi seksual anak. Data Action Pour Les Enfants Kamboja (APLE) menyebutkan bahwasanya sepanjang 2003 hingga 2019 APLE berkontribusi menangkap 404 pelaku kejahatan seksual dimana 53% pelaku merupakan orang asing dan 46% dari pelaku merupakan warga Kamboja (Borgstrom and Larsson 2020). Adapun data jumlah penangkapan pelaku

kejahatan seksual terhadap anak sepanjang 2015-2019 yakni sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Penangkapan Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak



Sumber : (Borgstrom and Larsson 2020).

Mayoritas pelaku asing berasal dari Amerika Serikat, Vietnam, Inggris, Prancis, Jerman dan Australia disamping itu pelaku asing yang tertangkap di Kamboja kebanyakan berbasis di tempat wisata populer di Kamboja (Borgstrom and Larsson 2020). Disisi lain, eksploitasi seksual anak dalam pariwisata juga disebabkan oleh dorongan panti asuhan Kamboja kepada keluarga yang kurang mampu untuk menyerahkan anaknya ke panti asuhan, namun pada kenyataannya anak-anak yang tinggal di panti asuhan justru menjadi korban eksploitasi, mereka

dipaksa mengumpulkan uang dan meminta sumbangan kepada turis (Baury and Varrella 2018).

Jenis perdagangan manusia yang terjadi di domestik Kamboja juga mencakup eksploitasi seksual anak secara online. Meningkatnya penggunaan internet di Kamboja berdampak pada eksploitasi seksual anak secara online, sebanyak 4,1 juta atau 25% dari total populasi Kamboja merupakan pengguna internet dan sebanyak 25,8 juta atau 165% dari total populasi merupakan pengguna koneksi seluler (Baury and Varrella 2018). Eksploitasi seksual anak secara online di Kamboja dilakukan dengan cara merawat anak-anak guna mendapatkan informasi dan memperoleh foto anak-anak dibawah umur yang bertujuan untuk eksploitasi seksual (ibid).

Pada 2019 lalu, Komite Nasional Penanggulangan Perdagangan Manusia (NCCT) Kamboja mengidentifikasi bahwasanya ada tiga provinsi Kamboja yakni Kampot, Siem Reap, dan Preah Sihanouk merupakan provinsi paling rentan terhadap pedofilia, kebanyakan pelaku pedofilia merupakan turis, para pedofil menggunakan eksploitasi anak melalui media online (The ASEAN Post 2019).

Maraknya penggunaan internet di Kamboja merupakan tantangan baru bagi Kamboja dalam menghadapi perdagangan manusia. Umumnya anak-anak di Kamboja menggunakan internet sebagai alat untuk mencari informasi namun pada saat yang sama para predator juga menggunakan internet untuk melakukan pelecehan (The ASEAN Post 2019). Data dari The ASEAN Post menyebutkan bahwasanya sepanjang 2017 hingga 2019 jumlah pengguna internet, pengguna

media sosial aktif dan pengguna sosial mobile aktif terus mengalami peningkatan yang signifikan (ibid).

Seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi di Kamboja para pedofil pun juga mengubah modus untuk melakukan eksploitasi seksual, hal ini dikarenakan sebelum turis sampai negara tujuan mereka sudah mempersiapkan sebelumnya dengan cara memanfaatkan website untuk mendapatkan korban (The Bangkok Post 2016).

2.3 Perdagangan Manusia Lintas Batas

Sebagai permasalahan transnasional perdagangan manusia juga menyebar ke lintas batas negara. Di level internasional Kamboja juga menghadapi perdagangan manusia berupa migrasi ilegal, kawin paksa, perbudakan di industri perikanan. Peningkatan angka usia kerja di Kamboja pada 2015 berkontribusi pada peningkatan migrasi lintas batas.

Seiring dengan meningkatnya migrasi warga Kamboja ke luar negeri pada saat yang sama Kamboja juga menghadapi permasalahan migrasi ilegal. Mayoritas pekerja ilegal tidak memiliki hak terhadap akses kesehatan dan rentan menjadi korban diskriminasi seperti lembur paksa, pemotongan upah, upah yang minim dari rata-rata serta kondisi kerja yang buruk (Hing, Lun, and Phann 2011).

Migrasi ilegal yang dilakukan warga Kamboja ke negara tetangga terutama Thailand yang menjadi tujuan utama pekerja migran. Kebanyakan daerah Thailand yang menjadi tujuan utama pekerja migran yaitu daerah KEK yang letaknya di perbatasan antara Kamboja dan Thailand seperti Bavet, Poipet,

Koh Kong hal ini dikarenakan para imigran melihat adanya potensi ekonomi (Kuroiwa (eds.) 2012, 93-95).

Akan tetapi kebanyakan pekerja migran melakukan migrasi melalui jalur ilegal. Data statistik pemerintah Thailand menyebutkan hanya 12-13% atau sekitar 115.000 pekerja Kamboja di Thailand yang memiliki paspor, dan sisanya merupakan pelaku migrasi ilegal (Hatsukano 2017). Bahkan menurut data Return Migrants Survei pada 2015 tercatat 129 migran memasuki Thailand tanpa dokumen (ibid). Pada 2015 Thailand juga berhasil deportasi 67.087 pekerja migran ilegal asal Kamboja (Sukhumvit 2016).

Data ILO per Oktober 2018 menyebutkan bahwasanya sebanyak 3.083.451 total pekerja migran Thailand dan 35 persen dari total pekerja migran atau sekitar 301.426 diantaranya merupakan warga Kamboja, di antara jumlah pekerja migran tercatat sebanyak 1.020.413 migran yang berhasil melakukan proses verifikasi kewarganegaraan dan sebanyak 114.906 dari total pekerja migran merupakan warga Kamboja (Ouk, n.d.).

Diperkirakan ratusan ribu pekerja migran Kamboja di Thailand tidak mempunyai dokumen resmi, hal ini dikarenakan mahalnya biaya untuk membayar agen perekrutan resmi untuk memfasilitasi perpindahan yakni sekitar 650 dollar tentu dengan tingginya biaya ini membuat para imigran memilih jalur ilegal dengan melintasi perbatasan yang hanya memerlukan biaya sekitar 30 dolar (Blomberg 2019). Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Thailand tentu migrasi dari Kamboja menuju Thailand melalui jalur darat menjadi lebih mudah dan biaya yang lebih murah yang menyebabkan berbagai

resiko. Pada 2016 tentara Thailand berhasil menangkap 293 warga Kamboja yang melintasi perbatasan dengan cara ilegal bahkan pada Maret 2017 Thailand telah memulangkan lebih dari 1.000 pekerja ilegal kembali ke Kamboja (Phnom Penh Post 2017).

Selain Thailand, Malaysia juga merupakan tujuan migrasi warga Kamboja. Migrasi warga Kamboja ke Malaysia mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 1998 hingga 2015, peningkatan ini dikarenakan adanya izin yang dikeluarkan oleh MoHR (OECD and Cambodia Development Resource Institute 2017).

Meskipun pengiriman pekerja migran Kamboja dilakukan secara langsung oleh pemerintahan masih banyak migran Kamboja memasuki Malaysia melalui jalur ilegal. Para imigran ilegal masuk ke Malaysia melalui perbatasan Thailand atau menggunakan visa turis kemudian menetap untuk bekerja yang membuat mereka rentan menjadi korban perdagangan manusia (Sok 2019, 8).

Pada dasarnya pekerja migran Kamboja yang bekerja di Malaysia baik melalui jalur legal maupun ilegal beresiko menjadi korban eksploitasi dan pelecehan, terutama asisten rumah tangga. Beberapa pekerja rumah tangga juga rentan mengalami kekerasan fisik oleh majikannya (Berlin 2020). Tingginya biaya izin kerja merupakan alasan utama para migran melakukan jalur ilegal. Per 18 Maret 2016 biaya izin kerja disektor pertanian mencapai 640 MYR dan untuk sektor manufaktur, konstruksi dan jasa mencapai 1.850 MYR (ibid).

Selain migrasi ilegal Kamboja juga menghadapi perdagangan manusia di sektor industri perikanan. Industri perikanan merupakan salah satu tujuan para

imigran untuk bekerja, terutama di Asia Tenggara. Akan tetapi disisi lain industri perikanan merupakan pekerjaan yang paling rentan terhadap perdagangan manusia seperti perbudakan, pelecehan dan diskriminasi.

Pada Agustus 2015 sebanyak 58 warga Kamboja menjadi korban perbudakan kapal penangkap ikan Thailand di pulau Benjina, pada saat bekerja para migran menghadapi berbagai bentuk pelecehan dan diskriminasi seperti dicambuk, dan dikurung (Asia News 2015). Temuan perbudakan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan milik Thailand di wilayah perairan Indonesia ini membuktikan bahwasanya para pekerja migran yang bekerja di kapal penangkap ikan rentan menjadi korban perdagangan manusia.

Perkembangan globalisasi berdampak pada munculnya jenis-jenis baru dalam perdagangan manusia seperti perdagangan pengantin atau kawin paksa. Pada tahun 2015 Kamboja merupakan tujuan baru Tiongkok untuk kawin paksa. Sebelumnya, Vietnam merupakan tujuan utama pelaku perdagangan manusia untuk melakukan kawin paksa ke Tiongkok akan tetapi hal ini berubah setelah Vietnam memperkuat aturan kawin dan melakukan pencegahan dengan cara mengkampanyekan perang terhadap kawin paksa (Moore 2015).

Penguatan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat Vietnam terhadap bahaya perdagangan pengantin membuat para pedagang mengalihkan tujuan ke Kamboja. Minimnya regulasi hukum Kamboja mengenai kawin paksa dan kurangnya kesadaran masyarakat Kamboja membuat pelaku perdagangan semakin mudah, pengantin dibayar sekitar 10.000 hingga 15.000 dollar (Moore 2015).

Ekspektasi terhadap kehidupan yang lebih baik membuat para korban kawin paksa tertarik untuk dinikahkan dengan laki-laki Tiongkok akan tetapi pada kenyataannya korban justru dinikahkan dengan laki-laki miskin yang tinggal di pedesaan (Vicheika 2016). Bahkan beberapa korban dijanjikan pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi namun pada kenyataannya korban dipaksa menikah dengan laki-laki Tiongkok.

Pada 2016 UN Anti-trafficking Agency merilis laporan hasil wawancara dengan 42 perempuan Kamboja yang dilakukan pada September 2014 sampai dengan Maret 2015, melalui hasil wawancara tersebut ditemukan bahwasanya korban kawin paksa berusia 18 hingga 37 tahun (Vicheika 2016). Agen mendapatkan 25.000 dolar jika berhasil melakukan kawin paksa (Narin 2020). Perdagangan manusia merupakan masalah serius yang dihadapi Kamboja. Mayoritas agen, dan pelaku ilegal migran melakukan migrasi ilegal melalui perbatasan hal ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum, tidak adanya sanksi tegas terhadap pelaku serta lemahnya kontrol perbatasan membuat para migran mudah melakukan migrasi tanpa dokumen.

Namun ditutupnya perbatasan Kamboja untuk menangani perdagangan manusia juga tidak sepenuhnya efektif. Munculnya virus Covid-19 pada awal 2020 membuat semua negara menutup perbatasan termasuk Thailand yang merupakan tujuan utama migran Kamboja akan tetapi penutupan perbatasan ini memicu gelombang baru migrasi ilegal. Pada Juni 2020 polisi Thailand telah menangkap 2.500 pekerja asing dan 40 persennya merupakan warga Kamboja, pada dasarnya pekerja Kamboja telah kembali ke negaranya sejak awal pandemi

2020 lalu akan tetapi mereka ingin bekerja kembali ke Thailand dengan alasan untuk membayar jeratan utang (Sony and Keeton-Olsen 2020).

2.4 Upaya Pemerintah Kamboja dalam Menangani Perdagangan Manusia di

Level Domestik

Untuk menangani perdagangan manusia pada 2015-2020 pemerintah Kamboja telah memperkuat penegakan hukum. Pada 2015 pemerintah Kamboja telah mengeluarkan RAN 2014-2018 untuk memerangi praktik eksploitatif dengan memperkuat hukum dan meningkatkan strategi pencegahan (Cuddy and David 2015). Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Kamboja pada 2015 dapat dilihat dari ditugaskannya 500 polisi anti-trafficking dengan menempatkan 20 polisi di tiap provinsi (US Department of Labor 2016).

Selain itu NCCT Kamboja juga melakukan kerjasama dengan kementerian terkait dan LSM dalam memberikan pelatihan kepada penegak hukum di setiap provinsi mengenai undang-undang dan teknik investigasi terhadap korban dan teknik perlindungan (ibid). Hal ini dilakukan pemerintah sepanjang 2015-2020. Dalam menangani kerja paksa terhadap anak dibawah umur di sektor agrikultur pemerintah Kamboja juga bekerjasama dengan FAO, kerjasama ini sudah berlangsung lama akan tetapi pada 2015 pemerintah Kamboja berhasil melakukan ujian lapangan *FAO Handbook for monitoring and evaluation of child labour in agriculture* di Kamboja, *handbook* ini bertujuan untuk mengintegrasikan masalah pekerja anak ke dalam sistem perencanaan,

pemantauan dan evaluasi pemerintah Kamboja dan juga untuk melakukan pendekatan inovatif untuk mencegah pekerja anak (FAO 2015).

Pada 2016 Kementerian Tenaga Kerja telah memperketat pengawasan dengan menyelidiki pabrik batu bata yang mempekerjakan anak dibawah 15 tahun di setiap provinsi di Kamboja, selain melakukan penyelidikan terhadap pabrik batu bata pemerintah Kamboja juga membentuk kelompok khusus untuk menyelidiki pabrik batu bata di kota Phnom Penh (Sokhean 2016). Pada saat yang sama pemerintah Kamboja juga membentuk RAN Untuk Mempromosikan Kesetaraan Gender dan Penghapusan Pekerja Anak di Sektor Perikanan 2016-2020 untuk promosi kesetaraan gender yang mencakup promosi kesetaraan gender, dan penghapusan pekerja anak dibawah umur yang mencakup pencegahan, penarikan anak-anak dari pekerjaan yang berbahaya dan perlindungan (Fisheries Administration 2015).

Upaya meningkatkan pengawasan terus dilakukan pemerintah Kamboja. Pada 2017 berdasarkan laporan NCCT pemerintah Kamboja berhasil melakukan 66 penangkapan dan investigasi terhadap jaringan perdagangan manusia, melalui investigasi ini pihak berwenang mengirim 87 tersangka ke pengadilan, dan pada saat yang sama pemerintah Kamboja juga berhasil menyelamatkan 155 korban perdagangan manusia (Meta and Bourmont 2017). Dalam menangani perdagangan manusia pemerintah Kamboja juga memberikan pelatihan keterampilan di bidang tata rias dan teknik elektrik terhadap anak di usia 15-20 tahun (Dara 2018).

Banyaknya anak-anak korban perdagangan manusia yang putus sekolah membuat pemerintah Kamboja memberikan kursus. Pada 2018 pemerintah Kamboja juga memberikan kursus kepada anak-anak korban kerja paksa dengan tujuan menyesuaikan dengan pembelajaran di sekolah ketika mereka kembali ke sekolah (Dara 2018).

Seiring dengan munculnya jenis-jenis baru perdagangan manusia berupa OCSE pada 2019 pemerintah Kamboja juga melakukan kerjasama dengan NGO yaitu CPU untuk membentuk ICAC (Internet Crimes Against Children) yang bertujuan untuk melawan dan melakukan pengawasan eksploitasi anak secara online (Sochan 2019). Ditahun yang sama pemerintah Kamboja juga mengadakan seminar yang melibatkan 150 jurnalis, seminar ini bertujuan untuk menambah keterampilan jurnalis dalam pemberitaan perdagangan manusia di Kamboja (Dara 2019).

Permasalahan perdagangan manusia jenis OCSE di Kamboja semakin kompleks ketika dihadapkan pada situasi pandemi oleh karena itu dalam mengatasi OCSE pada 2020 pemerintah Kamboja memasukan pendidikan perdagangan manusia kedalam kurikulum sekolah dan mulai diberlakukan di sekolah pada 2021 (Blomberg 2020).

2.5 Upaya Pemerintah Kamboja dalam Menangani Perdagangan Manusia melalui Kerja Sama Internasional

Sebagai bentuk implementasi SPA IV pada 2017 Kamboja mengembangkan perjanjian kerjasama bilateral dengan Tiongkok (UN-ACT, n.d.). Melalui perjanjian bilateral Kamboja dan Tiongkok sepakat kerjasama

dalam berbagai hal yaitu pertukaran informasi, pembentukan gugus tugas untuk kegiatan bersama, melakukan operasi bersama terhadap pelaku perdagangan manusia pada April hingga Agustus 2017, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya perdagangan manusia terutama pernikahan di daerah yang rentan, melakukan sosialisasi mengenai dokumen yang diperlukan untuk perkawinan serta melakukan pertemuan bilateral secara berkala (UN-ACT, n.d.).

Sebelum melakukan kerjasama di bawah SPA IV COMMIT, pada 2016 Kamboja dan Tiongkok telah menandatangani MoU yang berfokus pada kawin paksa serta prosedur perizinan nikah (Channyda 2016). Pada 2016 pemerintah Kamboja berhasil memulangkan tiga puluh satu pengantin migran yang merupakan korban pelecehan (Muong and Wilson 2016). Upaya pemerintah Kamboja untuk memulangkan korban kawin di Tiongkok terus meningkat signifikan pada 2019 dimana pemerintah Kamboja berhasil memulangkan 112 korban perdagangan pengantin dari Tiongkok (Narin 2020). Tentu keberhasilan pemulangan korban perdagangan pengantin dikarenakan adanya kerjasama kedua negara.

Kamboja juga melakukan kerjasama bilateral dengan negara anggota COMMIT yakni Thailand. Pada April 2019 Kamboja dan Thailand telah menandatangani MoU yang bertujuan untuk memperkuat manajemen pemulangan dan reintegrasi korban perdagangan (David 2019). Satu bulan setelah penandatanganan MoU yakni pada Mei 2019 untuk pertama kalinya pengadilan Thailand mengadili dan menjatuhkan hukuman selama sembilan

tahun kepada seorang asal Kamboja yang memperdagangkan lima warga Kamboja untuk kerja paksa di industri perikanan Thailand (IJM n.d.).

Kerjasama untuk mengatasi perdagangan manusia tidak hanya dilakukan pemerintah Kamboja dengan negara GMS melalui COMMIT, pemerintah Kamboja juga melakukan kerjasama dengan Australia. Pada Maret 2015 Kamboja dan Australia menandatangani MoU tentang imigrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam menangani irregular migran, penyelundupan dan perdagangan manusia (Home Affairs Australia 2015). Menteri Dalam Negeri Kamboja menyampaikan bahwasanya MoU ini akan meningkatkan efektivitas Forum imigrasi Kamboja dan Australia, dimana Australia dan Kamboja terlibat dalam kegiatan bilateral, termasuk proyek teknis pengembangan kapasitas untuk memerangi perkembangan kejahatan transnasional (ibid).

Di samping itu Malaysia juga merupakan tujuan migrasi warga Kamboja untuk bekerja di sektor industri, konstruksi dan pekerja rumah tangga. Banyaknya pekerja rumah tangga asal Kamboja yang menjadi korban kekerasan di Malaysia membuat pemerintah Kamboja menghentikan pengiriman migran pada 2011 (David 2020). Namun, pemerintah Kamboja kembali mengirimkan pekerja rumah tangga ke Malaysia pada 2017 setelah adanya pertemuan bilateral antara Duta Besar Kamboja untuk Malaysia dengan Menteri Tenaga Kerja Kamboja, ITH Samheng (Narim 2022). Sejak tahun 2017 hingga 2022 Malaysia hanya mengirimkan 175 pekerja rumah tangga secara resmi (ibid).

Pada Januari 2020 lalu pemerintah Kamboja melalui MoWA meminta Malaysia mempercepat penandatanganan MoU anti perdagangan manusia yang tertunda sejak 2012 lalu, MoU ini bertujuan untuk melindungi warga Kamboja terutama pekerja rumah tangga (David 2020).



BAB 3

ANALISIS UPAYA KAMBOJA DALAM MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA 2015-2020

3.1 Upaya Domestik Kamboja dalam Menangani Perdagangan Manusia melalui Peningkatan Keamanan Individu dan Pencegahan

Perdagangan manusia merupakan masalah transnasional yang dapat mengancam negara, oleh karena itu dalam menangani perdagangan manusia perlu adanya kebijakan negara di level domestik seperti meningkatkan keamanan individu dan mengambil langkah pencegahan (Picarelli 2008, 464). Dalam meningkatkan keamanan individu dan pencegahan Kamboja telah melakukannya melalui keterlibatannya dalam konvensi internasional dalam memerangi perdagangan manusia.

Kamboja telah menandatangani berbagai perjanjian dan konvensi internasional mengenai perdagangan manusia yang kemudian diadopsi menjadi hukum nasional, oleh karena itu Kamboja telah memiliki kerangka dan standar hukum. Dalam menangani perdagangan manusia yang terjadi di tingkat domestik pemerintah Kamboja telah melakukan berbagai upaya baik melalui kebijakan, pencegahan serta penegakan hukum. Upaya menangani perdagangan manusia pencegahan dan peningkatan keamanan individu (Picarelli 2008, 464) telah dilakukan pemerintah Kamboja dalam mengadopsi penanganan perdagangan manusia sesuai dengan standar internasional.

Kamboja telah meratifikasi konvensi CRC (Convention on the Rights of the Child) pada 1992 (UNICEF 2019). Konvensi CRC mengatur hak hak pendidikan, kesehatan, perlindungan, bermain, partisipasi sosial politik terhadap anak dibawah 18 tahun (ibid). Hal ini menandakan keseriusan Kamboja dalam melindungi hak anak dibawah umur termasuk kerja paksa terhadap anak dibawah umur. Pada tahun yang sama sebagai bentuk komitmen Kamboja dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan Kamboja juga telah meratifikasi CEDAW akan tetapi protokol opsional CEDAW baru diratifikasi Kamboja pada tahun 2010 (NGO CEDAW 2019). Ratifikasi CEDAW bertujuan untuk perlindungan dari eksploitasi yang berujung pada perdagangan manusia.

Upaya Kamboja dalam memerangi perdagangan manusia tidak hanya melalui konvensi CRC dan CEDAW tetapi dalam konteks perdagangan manusia yang lebih luas komitmen Kamboja juga dapat dilihat melalui implementasi Kamboja terhadap protokol palermo. Kamboja merupakan negara yang meratifikasi protokol palermo, namun protokol palermo hanya terbatas pada dorongan persuasif kepada negara anggotanya untuk melakukan upaya menangani perdagangan manusia seperti perlindungan korban dan mencegah perdagangan melalui peningkatan kesadaran (Kranrattanasuit 2014, 110). Sebagai upaya dalam memerangi perdagangan manusia melalui penegakan hukum Kamboja telah memiliki undang-undang 1996 pasal 3 yang mengatur perdagangan manusia namun undang-undang ini tidak mendefinisikan dengan jelas mengenai perdagangan manusia (Keo et al. 2014, 202).

Dimulainya Bali Process pada 2002 membuat seluruh negara ASEAN termasuk Kamboja mengamandemen undang-undang nasional sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan Protokol Palermo (Song 2016) Pemerintah Kamboja terus memperkuat undang-undang nasional. Karena tidak adanya definisi yang jelas mengenai perdagangan manusia undang-undang ini tidak berjalan efektif. Lemahnya implementasi terhadap undang-undang tahun 1996 pasal 3 membuat pemerintah Kamboja terus melakukan perbaikan. Pada Februari 2008 pemerintah Kamboja mengamandemen Undang-undang mengenai pemberantasan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual (Kranrattanasuit 2014, 113). Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memberi sanksi tegas terhadap pelaku perdagangan manusia (ibid).

Kamboja merupakan negara anggota ASEAN pertama yang meratifikasi ACTIP (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons). Melalui Workshop yang diselenggarakan AICHR untuk memastikan implementasi ACTIP, pada Desember 2016 Presiden Komite Hak Asasi Manusia Kamboja Keo Remy menyampaikan keseriusan Kamboja dalam memerangi perdagangan manusia (AICHR n.d.). Dalam pertemuan itu Keo Remy menyampaikan strategi yang telah dilakukan pemerintah Kamboja yaitu melalui penguatan hukum nasional melalui diberlakukannya undang-undang nasional tentang perdagangan manusia (ibid).

Dengan diratifikasinya CRC, CEDAW, ACTIP serta keterlibatan Kamboja dalam protokol Palermo dan Bali Process merupakan upaya Kamboja untuk berperan aktif dalam meningkatkan keamanan individu dan pencegahan

(Picarelli 2008, 464). Hal ini dapat dilihat ketika pemerintah Kamboja terus memperkuat undang-undang yaitu dengan mengamandemen undang-undang pemberantasan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual pada 2008 (Kranrattanasuit 2014, 113). Disisi lain, untuk mengatur hak-hak pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial politik terhadap anak dibawah umur Kamboja telah meratifikasi CRC, dan Kamboja juga telah meratifikasi CEDAW untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Akan tetapi upaya menangani perdagangan manusia melalui peningkatan keamanan individu dan pencegahan tidak dapat hanya dilakukan melalui konvensi tetapi juga pengambilan kebijakan domestik (Picarelli 2008, 464).

Secara peraturan dan standarisasi untuk menangani perdagangan manusia Kamboja telah memiliki berbagai aturan dan perundang-undangan. Namun seiring meningkatnya tren perdagangan manusia yang terjadi di dunia internasional maupun di kawasan membuat pemerintah Kamboja harus mengambil berbagai kebijakan yang tidak hanya pada amandemen undang-undang sebagai bagian dari konvensi internasional tetapi juga mengimplementasikan jalannya undang-undang tersebut, proses identifikasi korban sesuai standar, penegakan hukum terhadap pelaku, perlindungan korban serta meningkatkan upaya pencegahan untuk meminimalisir korban. Oleh karena itu dalam memaksimalkan penerapan undang-undang dan upaya memerangi perdagangan manusia melalui peningkatan keamanan individu dan pencegahan (Picarelli 2008, 464) pemerintah Kamboja juga membuat Rencana Aksi Nasional

(RAN), memperkuat peran aparat penegak hukum dan melakukan investigasi secara masif.

Jika dilihat dari persentase rata-rata jumlah pekerja anak dibawah umur 2015-2020 (Tabel 1) dapat dilihat bahwasanya anak-anak Kamboja rentan menjadi korban eksploitasi terhadap anak dibawah umur. Dalam merespon perdagangan manusia negara perlu meningkatkan keamanan individu (Picarelli 2008, 464). Berbagai upaya pemerintah Kamboja dalam meningkatkan keamanan individu dapat dilihat dari ditugaskannya kepolisian dan tim investigasi untuk menyelidiki pabrik yang dianggap melakukan kerja paksa terhadap anak dibawah umur, terutama pabrik batu bata. Tentu penyelidikan dan penutupan terhadap pabrik batu bata yang dianggap melakukan eksploitasi terhadap anak merupakan langkah yang tepat untuk meminimalisir korban eksploitasi anak.

Akan tetapi pada saat yang sama pemerintah Kamboja belum sepenuhnya berupaya meningkatkan keamanan individu. Dalam meningkatkan keamanan individu negara perlu mengambil kebijakan domestik untuk meningkatkan keamanan individu (Picarelli 2008). Namun, dalam menangani perdagangan manusia dilevel domestik pemerintah Kamboja tidak melakukan peningkatan keamanan terhadap pekerja anak dibawah umur. jika dilihat pada persentase rata-rata jumlah pekerja anak dibawah umur mayoritas pekerja anak yakni sebesar 74% bekerja di sektor agrikultur (Tabel 1), akan tetapi sepanjang 2015-2020 pemerintah Kamboja hanya berfokus pada pengawasan di sektor industri. Tentu kerjasama pemerintah Kamboja dengan organisasi internasional seperti FAO

merupakan upaya Kamboja untuk meningkatkan keamanan individu dan melakukan pencegahan guna meminimalisir pekerja anak dibawah umur. Namun pemerintah Kamboja belum secara kongkrit mengatur regulasi dan penguatan hukum domestik untuk melindungi pekerja anak dibawah umur, terutama di sektor agrikultur.

Disamping itu pemerintah Kamboja tidak melakukan investigasi dan pengawasan terhadap perusahaan atau pabrik di sektor agrikultur dan service yang mempekerjakan anak dibawah umur. Bahkan pengawasan terhadap pabrik industri pun tidak sepenuhnya berhasil. Jika dikaitkan dengan respon negara dalam menangani perdagangan manusia dengan meningkatkan keamanan individu (Picarelli 2008) tentu langkah yang diambil pemerintah Kamboja dalam menangani perdagangan manusia belum sepenuhnya efektif.

Pada 2016 misalnya, pemerintah Kamboja telah menerima banyak laporan mengenai pabrik yang mempekerjakan anak dibawah umur akan tetapi Kementerian Tenaga Kerja Kamboja menyatakan bahwa pihaknya belum menemukan bukti yang kuat terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pabrik (Sokhean 2016).

Namun, berbeda dengan Kementerian Tenaga Kerja sebuah LSM Kamboja, Licadho Advocacy melakukan investigasi sepanjang Juni hingga Agustus 2016, dalam investigasi ini pihaknya menemukan pekerja anak di sebelas lokasi pabrik batu bata (ibid). Adanya temuan Licadho Advocacy mengenai pekerja anak dibawah umur membuktikan masih lemahnya pengawasan penegak hukum. Dalam merespon Kementerian Tenaga Kerja

Kamboja yang menyatakan tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pabrik seorang wakil direktur Licadho Advocacy, Naly Pilorge mengatakan bahwasanya polisi dan pihak berwenang mengetahui apa yang terjadi di pabrik-pabrik ini, akan tetapi mereka tidak mengambil tindakan terhadap pemilik pabrik (Sokhean 2016).

Kebanyakan pelaku perdagangan manusia di Kamboja tidak dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku (US Department of Labor 2017). Beberapa penegak hukum cenderung takut menyelidiki kasus perdagangan manusia karena adanya keterlibatan antara pelaku perdagangan dan pejabat otoritas terkait membuat kasus ini sulit dibuka. Wakil kepala urusan perempuan dan anak ADHOC Kamboja mengatakan bahwa polisi tingkat rendah tidak menyelidiki perdagangan manusia karena takut mengganggu bisnis pejabat yang memiliki pangkat tinggi (Blomberg 2019).

Bahkan perusahaan dan tempat hiburan yang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak memiliki koneksi dengan pemerintah, mereka juga melakukan kerjasama dengan penegak hukum untuk menghindari sanksi (US Department of Labor 2020). Selain itu pelaku perdagangan manusia yang diadili kerap menyuap penegak hukum untuk meringankan tuntutan, bahkan kebanyakan para pelaku dibebaskan dari dakwaan sebelum diadili (ibid).

Hal ini memperlihatkan dalam merespon perdagangan manusia melalui peningkatan keamanan individu (Picarelli 2008, 464) pemerintah Kamboja belum melakukan upaya maksimal. Hal ini dapat dilihat dari lemahnya

penegakan hukum, keterlibatan pejabat di struktur pemerintahan serta masih lemahnya pengawasan

Dalam merespon permasalahan perdagangan manusia negara juga perlu mengambil langkah pencegahan di level domestik (Picarelli 2008, 464). Upaya pemerintah Kamboja dalam melakukan pencegahan dapat dilihat dari pemberian pelatihan keterampilan kepada anak-anak di usia 15 hingga 20 tahun.

Tentu dengan adanya pelatihan ini dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak dibawah umur, hal ini dapat dilihat bahwasanya alasan migrasi maupun meningkatnya pekerja seks komersial dikarenakan rendahnya pendidikan, keterbatasan skill, dan minimnya lapangan kerja oleh karena itu dengan adanya pelatihan ini anak-anak Kamboja yang putus sekolah dapat menggunakan keterampilannya untuk bekerja. Selain memberikan pelatihan langkah pemerintah Kamboja juga memasukan pendidikan perdagangan manusia ke dalam kurikulum sekolah tentu merupakan langkah pencegahan untuk meningkatkan *awareness* murid di sekolah mengenai bahaya perdagangan manusia. Hal ini merupakan bagian dari respon negara dalam menangani perdagangan manusia melalui pencegahan (Picarelli 2008, 464)

Peningkatan pendidikan merupakan hal yang penting dalam mencegah terjadinya perdagangan manusia. Minimnya akses terhadap pendidikan dan mahalnya biaya pendidikan menyebabkan anak-anak Kamboja putus sekolah dan menyebabkan mereka menjadi korban perdagangan manusia. Namun, dalam melakukan upaya pencegahan (Picarelli 2008, 64) diperlukan adanya peningkatan akses pendidikan formal. Oleh karena itu pemberian pelatihan *skill*

tidak sepenuhnya efektif dalam mencegah perdagangan manusia, diperlukan adanya pendidikan formal. Akan tetapi pada kenyataannya kesenjangan akses pendidikan yang masih terjadi di Kamboja menyebabkan banyak anak yang menjadi korban perdagangan manusia.

Meskipun undang-undang Kamboja telah menjamin pendidikan gratis untuk anak-anak, tentu ini dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah Kamboja untuk pemerataan akses pendidikan dalam mencegah perdagangan manusia akan tetapi pada implementasinya para murid tetap diminta membayar biaya untuk membayar gedung (US Department of Labor 2019). Tentu tingginya biaya membuat anak-anak Kamboja lebih memilih untuk bekerja.

Dalam hal ini memperlihatkan upaya pemerintah Kamboja dalam melakukan pencegahan di tingkat domestik (Picarelli 2008) melalui pelatihan skill bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah Kamboja yang belum menjamin akses pendidikan. Hal lain yang menyebabkan kesenjangan akses pendidikan yaitu sistem pendidikan Kamboja yang masih bersifat sentralisasi dan kurangnya sumber daya tenaga pengajar. Sekolah umum yang menggunakan Kamboja masih minim dalam memberikan layanan pendidikan dikarenakan keterbatasan sumber daya dan tidak memadainya guru yang terlatih (Sambath 2021).

Oleh karena itu untuk melakukan pencegahan perdagangan manusia (Picarelli 2008) pemerintah Kamboja perlu memberikan akses pendidikan sepenuhnya kepada anak-anak Kamboja agar dapat menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas. Disamping itu pemerintah Kamboja juga

perlu meningkatkan kompetensi tenaga pengajar baik melalui pelatihan maupun mengasah profesionalisme.

Dalam melakukan upaya pencegahan (Picarelli 2008, 464) pemerintah Kamboja juga telah melakukan kerjasama dengan sebuah NGO yakni CPU untuk melawan dan meningkatkan pengawasan terhadap OCSE, dan juga memasukan kurikulum perdagangan manusia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini memicu munculnya OCSE oleh karena itu kerjasama dengan NGO untuk menangani OCSE merupakan langkah yang tepat. Disamping itu dimasukkannya kurikulum mengenai perdagangan manusia pada pendidikan formal dapat meminimalisir anak-anak Kamboja menjadi korban perdagangan manusia. Diterapkannya kurikulum mengenai perdagangan manusia dapat dilihat sebagai respon negara dalam memerangi perdagangan manusia melalui pencegahan (Picarelli 2008, 464).

Anak dibawah umur kerap menjadi korban perdagangan manusia, hal ini terjadi karena ketidaktahuan mereka terhadap bahayanya. Dengan adanya pendidikan ini tentu dapat memberikan informasi kepada anak-anak di sekolah akan bahaya dan resiko dari tindak perdagangan. Namun, pada saat yang sama pemerintah Kamboja belum melakukan pencegahan yang efektif, terutama dalam menangani OCSE. Hal ini disebabkan karena tidak adanya peraturan undang-undang Kamboja.

Undang-undang Kamboja menghambat penyelidikan OSCE. Pada 2019 misalnya, Kamboja melakukan kerjasama internasional bersama FBI (Federal Bureau of Investigation) dan AFP (Australian Federal Police) memberikan

pelatihan kepada polisi Kamboja untuk menyelidiki kasus OSCE akan tetapi penyelidikan OSCE tidak diizinkan oleh hukum Kamboja karena tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang kejahatan dunia maya (Blomberg 2019). Wakil Direktur Departemen Kejahatan Dunia Maya Khuon Sok Piseth, dalam wawancara yang dilakukan Reuters mengatakan :

“ Penyelidikan tersembunyi terhadap kasus pelecehan seksual tidak diizinkan di bawah hukum Kamboja, hal ini membuat pihak berwenang kesulitan mengatasi tren pelecehan seksual... Kami membutuhkan kapasitas ini untuk menyusup ke jaringan dan kami membutuhkan undang-undang dunia maya agar departemen menjalankan misinya dengan benar... Undang-undang mengenai kejahatan dunia maya yang lebih komprehensif telah dipersiapkan setidaknya selama dua tahun " (Blomberg 2019).

Bahkan Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri Kamboja menolak usulan undang-undang mengenai kejahatan dunia maya (Blomberg 2019). Oleh karena itu upaya pemerintah Kamboja dalam melakukan pencegahan terutama dalam menangani OCSE pada implementasinya belum dijalankan sepenuhnya. Hal ini memperlihatkan ketidakseriusan pemerintah Kamboja dalam merespon perdagangan manusia dan keterbatasan pemerintah dalam melakukan pencegahan.

Upaya pencegahan (Picarelli 2008) yang dilakukan pemerintah Kamboja dalam meningkatkan *awareness* terhadap masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia juga dapat dilihat melalui kerjasama pemerintah Kamboja dengan jurnalis pada 2019. Tentu pers berperan penting dalam menyebarkan berita di masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya pemerintah Kamboja melakukan pembungkaman terhadap pihak-pihak yang melakukan kritik.

Pada 2017 Hun Sen melakukan pembungkaman dengan cara menutup media yang kritis terhadap kebijakan pemerintah Kamboja, semua media kritis dianggap melakukan makar dan diancam hukuman penjara (Syah 2020). Bahkan pada Agustus 2017 pemerintah Kamboja melalui Kementerian Luar Negeri Kamboja juga meminta LSM dan media massa yang didanai oleh AS untuk keluar dari Kamboja, hal ini dikarenakan berbagai media internasional yang berbasis di Kamboja kerap melakukan kritik terhadap pemerintah (Ariefana 2017)

Pemerintah Kamboja juga melakukan pembungkaman terhadap LSM dengan menutup LSM yang menangani perdagangan manusia. Pada 2015 Hun Sen telah mengamandemen undang-undang yang memungkinkan pihak berwenang untuk menutup LSM yang dianggap membahayakan keamanan nasional (The Straits Times 2017). Undang-undang ini kemudian menjadi legitimasi untuk pemerintah Kamboja membungkam organisasi yang berlawanan dengan pemerintah. Pada 1 Agustus 2017 Hun Sen menutup AIM (Agape International Mission) yang sudah ada dan membantu menangani kasus perdagangan manusia di Kamboja sejak 1988, penutupan AIM ini disebabkan oleh tayangan dokumenter CNN yang memperlihatkan tiga perempuan Kamboja yang merupakan korban perdagangan seks berhasil diselamatkan oleh AIM (The Straits Times 2017).

Hun Sen menganggap bahwa penayangan dokumenter oleh CNN ini merupakan bagian penghinaan terhadap negaranya (The Straits Times 2017). Tentu dengan adanya penutupan LSM ini dapat dilihat sebagai ancaman oleh

LSM lain yang aktif dalam melakukan advokasi isu perdagangan manusia. Dari sini dapat dilihat meskipun pemerintah Kamboja melakukan kerjasama dengan jurnalis namun hal itu bertolak belakang dengan pembungkaman terhadap pers yang dilakukan oleh pemerintah secara struktural. Pembungkaman ini menghalangi pemberitaan media mengenai perdagangan manusia.

Dalam tulisannya yang berjudul *Responses to Transnasional Crime* Picarelli menyebutkan pentingnya peningkatan keamanan individu dan pencegahan di level domestik untuk mengatasi perdagangan manusia. Berbagai upaya peningkatan keamanan individu dan pencegahan telah dilakukan pemerintah Kamboja melalui investigasi ke pabrik, kerjasama dengan FAO, kerjasama dengan jurnalis dan memasukan kurikulum anti perdagangan manusia ke sekolah. Akan tetapi upaya itu belum efektif karena hambatan yang terjadi secara struktural di Kamboja seperti keterlibatan pejabat dalam perdagangan manusia, pembungkaman terhadap media dan LSM, serta minimnya undang-undang Kamboja dalam penyelidikan OCSE.

3.2 Upaya Kamboja Menangani Perdagangan Manusia melalui MLATs

Kerjasama antar negara melalui mekanisme regional merupakan komponen penting dalam memerangi kejahatan transnasional (Picarelli 2008, 465). Kamboja merupakan negara anggota Bali Process dan COMMIT. Oleh karena itu Kamboja perlu memperlihatkan komitmennya untuk menangani perdagangan manusia.

Perdagangan manusia merupakan permasalahan yang terjadi lintas batas oleh karena itu untuk memerangi perdagangan manusia diperlukan adanya kerjasama internasional. Dimulainya Bali Process membuat Kamboja harus menerapkan protokol palermo. Protokol Palermo juga mengatur langkah standar untuk mengembangkan komunikasi dan kolaborasi penegak hukum antar negara, disamping itu protokol palermo juga mempromosikan pembentukan tim investigasi melalui kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral (Kranrattanasuit 2014, 110-111). Bahkan negara yang terlibat dalam Bali Process telah menyatakan komitmennya untuk memperkuat manajemen migrasi.

Pada konferensi tingkat menteri Bali Process ke enam yang dilaksanakan pada Maret 2016 melalui Deklarasi Bali Process on People Smuggling, trafficking in Persons, and Related Transnational Crime menegaskan komitmennya untuk mengurangi korban eksploitasi migran dengan cara memperluas keamanan, dan memperluas jalur migrasi yang legal (Bali Process n.d.).

Negara GMS (Greater Mekong Subregion) merupakan negara dengan migrasi lintas batas tertinggi di dunia (Davy 2014). Kamboja merupakan salah satu negara GMS. Tingginya angka migrasi lintas batas tentu beresiko tinggi terhadap perdagangan manusia (Song 2016). Kamboja dan negara GMS lainnya merupakan daerah utama perdagangan manusia di Asia Tenggara (Ullah and Hossain 2011, 276).

Pada dasarnya upaya kerja sama Kamboja dengan negara GMS lainnya yakni Tiongkok, Laos, Vietnam, dan Myanmar dalam menangani perdagangan

manusia dapat dilihat melalui dibentuknya COMMIT pada 2004 (Ristanti 2021, 33). Selain untuk memerangi perdagangan manusia COMMIT juga bertujuan untuk membangun pendekatan regional (ibid). Dalam memerangi kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia negara perlu bekerjasama secara regional (Picarelli 2008, 465). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dalam menangani perdagangan manusia Kamboja telah terlibat dengan COMMIT.

Kamboja sebagai negara anggota COMMIT berperan penting dalam memerangi perdagangan manusia. Komitmen Kamboja dapat dilihat melalui pertemuan COMMIT ke-10 yang diselenggarakan pada April 2015. Dalam pertemuan COMMIT ke-10 Menteri Perempuan Kamboja, Ing Kantha Phavi mengatakan :

“ Sebagai komunitas yang terkena dampak kejahatan transnasional serta migrasi yang tidak aman, kita perlu terus memperkuat respons kita melalui perjanjian regional dan bilateral antara negara kita. Secara khusus kita perlu menetapkan prosedur operasi standar yang memfasilitasi penuntutan pelaku perdagangan manusia serta perlindungan korban” (Khmer Times 2015).

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Perempuan Kamboja pada pertemuan COMMIT ke-10 menunjukkan komitmen Kamboja untuk memperkuat kerjasama bilateral antar negara anggota COMMIT serta untuk memperkuat penegakan hukum untuk pelaku perdagangan manusia. Penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku sehingga tidak membuat pelaku jera merupakan salah satu alasan maraknya perdagangan manusia oleh karena itu dengan dibuatnya standar untuk memfasilitasi penuntutan pelaku tentu dapat menghukum pelaku sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Upaya Kamboja dalam mengatasi perdagangan manusia juga dapat dilihat melalui kerjasama yang dilakukan

bilateral Kamboja dengan salah satu negara anggota COMMIT yakni Tiongkok. Pada 2015 COMMIT meluncurkan SPA IV 2015-2018 (COMMIT Subregional Plan of Action on Trafficking) yang menekankan pentingnya perjanjian bilateral antar negara anggota COMMIT (UN-ACT, n.d.).

MLATs berperan penting dalam kerjasama internasional dalam memerangi perdagangan manusia. Jalannya MLATs disepakati melalui perjanjian bilateral, perjanjian multilateral serta MoU (Indriati 2009, 106). (Indriati 2009) MLATs berperan untuk menyesuaikan kode hukum yang berbeda antar negara untuk melakukan kerjasama (Picarelli, 2008, 465). Dalam melaksanakan MLATs Kamboja telah menjalin kerjasama dengan Tiongkok, Thailand, dan Australia untuk memerangi perdagangan manusia, bahkan Kamboja juga dalam pertemuan COMMIT 2017 Kamboja mengembangkan kerjasama dengan Tiongkok sebagai bentuk implementasi COMMIT SPA IV.

Disamping itu Kamboja juga telah mendorong Malaysia untuk menandatangani MoU perlindungan pekerja rumah tangga. Kerjasama yang dilakukan Kamboja melalui MLATs merupakan langkah yang tepat untuk melakukan kerjasama dalam melakukan repatriasi, penegakan hukum, pertukaran informasi, peningkatan kerjasama dan sosialisasi sebagai langkah pencegahan (Picarelli 2004). Keberhasilan dari MoU ini dapat dilihat dari angka repatriasi terhadap korban perdagangan manusia dan penegakan hukum yang diberikan oleh pemerintah Thailand kepada warga Kamboja yang tertangkap melakukan perdagangan manusia di industri perikanan.

Namun implementasi MLATs yang ditandatangani pemerintah Kamboja secara bilateral dengan negara lain untuk menangani perdagangan manusia pada kenyataannya memiliki berbagai hambatan. Dalam hal implementasi MoU Kamboja - Tiongkok pemerintah Kamboja belum memberikan perhatian khusus untuk menindaklanjuti MoU ini, hal ini dapat dilihat dari minimnya alokasi dana yang diberikan pemerintah Kamboja (Global Citizen 2019). Kurangnya alokasi dana yang diberikan pemerintah Kamboja dalam menangani perdagangan manusia merupakan hambatan untuk melaksanakan MoU. Hal ini membuat kerjasama melalui MLATs antara Kamboja dan Tiongkok tidak berjalan efektif.

Keterlibatan pejabat Kamboja dalam perdagangan manusia juga menghambat upaya penanganan perdagangan manusia. Menurut petugas pusat aliansi perburuhan dan HAM, Dy Thehoya menyebutkan pejabat Kamboja yang tinggal di Tiongkok terlibat dan mendapatkan keuntungan dari perdagangan, pejabat Kamboja yang ditugaskan di Tiongkok cenderung tidak kooperatif jika diminta bantuan untuk kasus kawin paksa (Global Citizen 2019). Keterlibatan pejabat Kamboja dalam perdagangan manusia lintas batas menyebabkan sulitnya pengungkapan kasus.

Dalam hal upaya perlindungan, terutama bagi pekerja rumah tangga Kamboja di Malaysia pemerintah Kamboja telah mendorong Malaysia untuk menandatangani MoU perlindungan pekerja rumah tangga untuk melindungi warga Kamboja yang rentan menjadi korban perdagangan manusia dapat dilihat sebagai komitmen Kamboja untuk menangani perdagangan manusia, bahkan kebijakan Kamboja untuk mengurangi pengiriman pekerja rumah tangga ke

Malaysia sejak 2017 merupakan langkah yang tepat dalam mencegah eksploitasi pekerja oleh majikan.

Akan tetapi, pemerintah Kamboja perlu melakukan negosiasi kepada pemerintah Malaysia untuk segera menandatangani MoU. Meskipun pemerintah Kamboja mengurangi pengiriman pekerja rumah tangga ke Malaysia akan tetapi untuk menjamin keamanan dan penguatan dasar hukum untuk memastikan bahwasanya pekerja Kamboja di Malaysia mendapatkan upah yang layak, tidak terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang berbahaya oleh karena itu kedua negara perlu menandatangani MoU. Penandatanganan MoU diperlukan untuk penyesuaian kode hukum antar negara sebagai acuan hukum dan komitmen kedua belah pihak untuk menangani perdagangan manusia (Picarelli 2008, 465).

Selain itu Kamboja juga perlu memperkuat kerjasama bilateral dengan negara lain dalam menangani perdagangan manusia dengan disepakatinya pertemuan bilateral antar negara untuk meninjau efektifitas implementasi MoU, serta melakukan investigasi bersama sebagaimana MoU bilateral Kamboja dengan Tiongkok pada 2017. Kamboja juga perlu melakukan kerjasama bilateral dibawah MLATs (Picarelli 2008, 465) dengan negara lain dalam menangani perdagangan manusia terutama negara-negara tetangga seperti Laos, Vietnam, Filipina, Singapore, dan Indonesia.

Meskipun Kamboja telah terikat dengan Vietnam dan Laos dibawah COMMIT, namun dengan diluncurkannya COMMIT SPA IV yang menekankan pentingnya perjanjian bilateral dengan negara anggota COMMIT untuk memperkuat kerjasama mengharuskan Kamboja untuk secara khusus melakukan

kerjasama secara bilateral dengan negara anggota COMMIT. mengingat perdagangan manusia merupakan permasalahan transnasional yang kompleks. negara Oleh karena itu Kamboja perlu terus melakukan kerjasama dibawah MLATs (Picarelli 2008).

Pada Desember 2016 misalnya kedutaan Kamboja di Tokyo berhasil menyelamatkan tujuh wanita asal Kamboja yang dijanjikan bekerja di restoran dengan upah yang tinggi Jepang, namun pada saat mereka bekerja mereka dipaksa melakukan hubungan seksual, jika tidak restoran tidak akan membayar upah (The Straits Times 2017). Oleh karena itu Kamboja perlu melakukan kerjasama bilateral melalui MoU dengan Jepang dan negara-negara lainnya untuk menangani perdagangan manusia dan memudahkan proses repatriasi serta penegakan hukum terhadap pelaku.

BAB 4

4.1 Kesimpulan

Komitmen Kamboja dalam menangani perdagangan manusia dapat dilihat dari langkah Kamboja meratifikasi berbagai perjanjian dan konvensi internasional seperti CRC, CEDAW, Protokol Palermo, Bali Process dan ACTIP. Ratifikasi Kamboja terhadap perjanjian dan konvensi internasional membuat Kamboja mengadopsinya menjadi hukum nasional. Dalam menangani permasalahan transnasional negara perlu melakukan peningkatan keamanan individu dan pencegahan, dalam hal ini Kamboja telah meningkatkan keamanan individu dan langkah pencegahan dengan membuat berbagai RAN dan memperkuat penegakan hukum dengan memberikan pelatihan kepada penegak hukum disetiap provinsi serta melakukan investigasi ke setiap pabrik yang dianggap melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur.

Dalam hal pencegahan pemerintah Kamboja juga telah memberikan pelatihan keterampilan kepada anak-anak usia 15-20 tahun, kerjasama dengan jurnalis untuk meningkatkan *awareness* kepada masyarakat melalui pemberitaan, disamping itu langkah pencegahan Kamboja juga dapat dilihat dari kerjasama Kamboja dengan NGO dengan membentuk ICAC untuk memerangi dan mencegah OCSE. Namun upaya Kamboja dalam meningkatkan keamanan individu dan melakukan pencegahan tidak sepenuhnya efektif, hal ini dapat dilihat dari minimnya akses pendidikan, adanya hambatan undang-undang Kamboja untuk mengatasi masalah OCSE yang menghambat penyidikan dan

pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja terhadap pihak yang melakukan kritik.

Dalam menangani perdagangan manusia pemerintah Kamboja juga melakukan kerjasama melalui MLATs. Kerjasama Kamboja dengan negara lain melalui penandatanganan MoU dapat dikatakan berhasil dalam melindungi warga Kamboja yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri. MoU ini memudahkan proses repatriasi dan meningkatkan manajemen migrasi. Namun, pada saat yang sama dalam MoU Kamboja dengan Tiongkok keterlibatan pejabat Kamboja dan kurangnya alokasi dana yang diberikan pemerintah membuat MoU ini tidak berjalan dengan efektif. Disamping itu Kamboja juga perlu meningkatkan kerjasama dan penandatanganan MoU untuk menangani perdagangan manusia dengan negara lain.

4.2 Rekomendasi

Dalam upaya menangani perdagangan manusia pemerintah Kamboja telah meningkatkan keamanan individu serta melakukan pencegahan dalam berbagai kebijakan domestik dan juga kerjasama regional dan bilateral dibawah MLATs untuk pencegahan, memudahkan proses repatriasi, dan pemberian hukuman terhadap perilaku perdagangan manusia. Akan tetapi upaya implementasinya masih lemah, oleh karena itu pemerintah Kamboja perlu memaksimalkan alokasi dana untuk memaksimalkan kapasitas implementasi dari MoU.

Disamping itu pemerintah Kamboja juga harus memperkuat hukum, dan bekerjasama dengan media untuk mendapatkan informasi dan menyelidiki perdagangan manusia serta menyebarkan *awareness* kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia melalui media. Pemerintah Kamboja juga harus memperkuat penegakan hukum hal ini sejalan dengan munculnya ancaman-ancaman baru seperti OCSE membuat Kamboja harus mengambil kebijakan yang menyesuaikan dan memperkuat aturan hukum untuk menangani OCSE misalnya dengan membuat undang-undang baru yang memberikan wewenang kepada pihak berwajib untuk dapat melakukan penyelidikan *cyber* secara sembunyi-sembunyi sehingga pelaku dapat diberikan sanksi.

Dalam hal keterlibatan pejabat pemerintahan dalam perdagangan manusia, pemerintah Kamboja maupun penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan juga perlu memperhatikan komitmen untuk menyelidiki dan menghentikan pejabat yang terlibat dan mengambil keuntungan dalam perdagangan manusia untuk dapat menyelidiki kasus perdagangan manusia secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- AICHR. n.d. "AICHR Regional Workshop on Strengthening National Plans of Action on Trafficking in Persons to Ensure Effective Implementation of the ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) and ASEAN Plan of Action against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (APA), Phnom Penh, Cambodia, 1 & 2 December 2016." *AICHR* (blog). Accessed March 28, 2022. <https://aichr.org/news/aichr-regional-workshop-on-strengthening-national-plans-of-action-on-trafficking-in-persons-to-ensure-effective-implementation-of-the-asean-convention-against-trafficking-in-persons-especially-women/>.
- Ariefana, Pebriansyah. 2017. "Kamboja Usir LSM dan Media Massa yang Dekat dengan AS." *suara.com*. August 25, 2017. <https://www.suara.com/news/2017/08/25/040500/kamboja-usir-lsm-dan-media-massa-yang-dekat-dengan-as>.
- Asia News. 2015. "Moluccas: Cambodian Fishermen among Hundreds of Enslaved Migrants." *Asianews.It*. 2015. <https://www.asianews.it/news-en/Moluccas:-Cambodian-fishermen-among-hundreds-of-enslaved-migrants-33917.html>.
- Bakry, Umar Suryadi. 2017. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bali Process. n.d. "The Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime." Accessed April 1, 2022.

<https://www.baliprocess.net/>.

Baury, Chloe, and Varrella. 2018. "Country Overview : A Report on the Scale, Scope, and Context of the Sexual Exploitation of Children." ECPAT International. <https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/08/ECPAT-Country-Overview-Cambodia-2.pdf>.

Berlin, Lexi. 2020. "Abuse of Cambodian Migrant Domestic Workers in Malaysia | Modern Southeast Asia." 2020. <https://seasia.yale.edu/news/abuse-cambodian-migrant-domestic-workers-malaysia>.

Blomberg, Matt. 2019a. "U.S. Sees Cambodia's Anti-Trafficking Efforts Floundering." *Reuters*, June 20, 2019. <https://uk.reuters.com/article/us-usa-trafficking-cambodia-idUSKCN1TL21Q>.

———. 2019b. "Cambodia Feared Lagging behind Predators in Cybersex Trafficking Crackdown." *Reuters*, September 11, 2019, sec. Big Story 10. <https://www.reuters.com/article/us-cambodia-sexcrimes-children-idUSKCN1VW00B>.

———. 2020a. "Cambodia Adds Human Trafficking Lessons to Schools | Reuters." 2020. <https://www.reuters.com/article/us-cambodia-slavery-education-trfn-idUSKBN28Y0WL>.

———. 2020b. "Closed Borders Give Rise to New Wave of Trafficking in Cambodia | Reuters." 2020. <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-cambodia-slavery-t-idUSKBN2341SR>.

Borgstrom, Joel, and Christian Larsson. 2020. "Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism : The Cambodian Case."

<https://wordpress.foundationcenter.org/elevatechildren/wp-content/uploads/sites/33/2020/10/Sexual-exploitation-of-Children-in-Travel-and-Tourism-Cambodian-case-web.pdf>.

Bou, Saroeun. 2019. "Ending Poverty in Cambodia: Giving Children a Chance to Return to School." 2019.

<https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/ending-poverty-cambodia-giving-children-chance-return-school>.

Channyda, Chhay. 2016. "China-Kingdom MoU Targets Illicit Bride Market." 2016. <https://www.phnompenhpost.com/national/china-kingdom-mou-targets-illicit-bride-market>.

Cuddy, Alice, and Sen David. 2015. "Anti-Trafficking Fight Expands." Anti-trafficking fight expands. Phnompenhpost.Com. 2015. <https://www.phnompenhpost.com/anti-trafficking-fight-expands>.

Dara, Mech. 2018. "NCCT Investigating and Closing down Factories over Child Labour." 2018. <https://www.phnompenhpost.com/national/ncct-investigating-and-closing-down-factories-over-child-labour>.

———. 2019. "Media Crucial in Fight against Trafficking." 2019. <https://www.phnompenhpost.com/national/media-crucial-fight-against-trafficking>.

David, Sen. 2019. "Cambodia, Thailand Sign Human Trafficking MoU - Khmer Times." 2019. <https://www.khmertimeskh.com/596898/cambodia-thailand-sign-human-trafficking-mou/>.

———. 2020. "Ministry Urges Malaysia to Speed up Maid Protection Agreement

- Khmer Times.” January 13, 2020.
<https://www.khmertimeskh.com/50679405/ministry-urges-malaysia-to-speed-up-maid-protection-agreement/>.

Domborwski, Katja. 2015. “Cambodia Is Seen as a Heaven for Paedophiles and Sex Tourists.” D+C. 2015. <https://www.dandc.eu/en/article/cambodia-seen-heaven-paedophiles-and-sex-tourists>.

FAO. 2015. “FAO Strives to Prevent Child Labour in Cambodia | Decent Rural Employment | МроДОВОУАСТВЕННАR m CeуACKOXOSPYCTBEHHAР OПFаHmsayMR OбaeДmHEHHó x Haymu.” 2015. <https://www.fao.org/rural-employment/resources/detail/ru/c/340395/>.

Fisheries Administration. 2015. “Action Plan for Gender Equality Promotion and Child Labour Elimination in The Fisheries Sector 2016-2020.” <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cam167591.pdf>.

Forbes. n.d. “One of Asia's Poorest Countries.” Forbes. Accessed October 24, 2020. <https://www.forbes.com/pictures/hill45efk/one-of-asias-poorest-co/>.

Global Citizen. 2019. “Cambodia and China Can't Stop ‘Bride Trafficking’ Without More Funding, Activists Say.” Global Citizen. 2019. <https://www.globalcitizen.org/en/content/cambodia-urged-to-end-bride-trafficking/>.

Grouchy, Jillian, and Grenfell Campus. 2015. “The Global Impact of the Sex Tourism Industry : Issues of Legalization.” Memorial Libraries University. https://research.library.mun.ca/11816/1/Jillian_Grouchy.pdf.

Habeahan, Peri Anda, and Tri Cahyo Utomo. 2018. “KERJASAMA AMERIKA

SERIKAT DAN THAILAND DALAM MENANGANI KASUS
SLAVERY AND HUMAN TRAFFICKING DI INDUSTRI PERIKANAN

THAILAND 2013-2017.” *Journal of International Relations* 4 (4): 905–

11. Hatsukano, Naomi. 2017. “Rethinking Migration Governance in the Mekong Region: From the Perspective of the Migrant Workers and Their Employers.” *ERIA*. 19.
https://www.ide.go.jp/English/Publish/Reports/Ec/201902_02.html.
- Hing, Vutha, Pide Lun, and Dalis Phann. 2011. “Irregular Migration from Cambodia: Characteristics, Challenges, and Regulatory Approach.” Working Paper 2011–26. PIDS Discussion Paper Series.
<https://www.econstor.eu/handle/10419/126861>.
- Home Affairs Australia. 2015. “Australia and Cambodia Sign New Immigration Agreement.” 2015.
<https://minister.homeaffairs.gov.au/peterdutton/Pages/2015/australia-and-cambodia-sign-new-immigration-agreement.aspx>.
- IJM. n.d. “Trafficking Conviction Brings Justice, Thai-Cambodian Border| International Justice Mission.” Accessed March 25, 2022.
<https://www.ijm.org/news/landmark-conviction-brings-justice-to-international-trafficking-network-on-both-sides-of-the-thai-cambodian-border>.
- ILO. n.d. “Cambodia: Legislation.” Accessed February 9, 2022.
https://www.ilo.org/ipec/Regionsandcountries/Asia/Cambodia/WCMS_203637/lang--en/index.htm.

- Indriati, Noer. 2009. "Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) Sebagai Instrument Pemberantasan Kejahatan Internasional." *Jurnal Dinamika Hukum* 9 (2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.218>.
- IOM. 2016. "Human Trafficking in the ASEAN (2015)." International Organization for Migration. 2016. <https://www.iom.int/infographics/human-trafficking-asean-2015>.
- Keo, Chenda, Thierry Bouhours, Roderic Broadhurst, and Brigitte Bouhours. 2014. "Human Trafficking and Moral Panic in Cambodia." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 653: 202–24.
- Khmer Times. 2015. "Mekong Senior Officials' Meeting on Counter-Human Trafficking Kicks off in Cambodia - Khmer Times." April 27, 2015. <https://www.khmertimeskh.com/56042/mekong-senior-officials-meeting-on-counter-human-trafficking-kicks-off-in-cambodia/>.
- Kimseng, Men. 2015. "Poor Governance at Root of Cambodia's Education Problems, Expert Says." VOA. 2015. <https://www.voacambodia.com/a/poor-governance-at-root-of-cambodia-education-problems-expert-says/2695566.html>.
- Kranrattanasuit, Naparat. 2014. *ASEAN and Human Trafficking*. Vol. 109. The Netherlands: Koninklijke Brill.
- Kuroiwa (eds.), Ikuo, ed. 2012. *Economic Integration and the Location of Industries: The Case of Less Developed East Asian Countries*. IDE-JETRO Series. New York: Palgrave Macmillan UK. <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=9544a558c7305acd4f0ece889f7>

c2293.

Meta, Kong, and Martin de Bourmont. 2017. “Busts on Human Trafficking Double.” 2017. <https://www.phnompenhpost.com/national/busts-human-trafficking-double>.

Moore, Jina. 2015. “Cambodia Is China's Newest Market For Foreign Brides.” BuzzFeed News. 2015. <https://www.buzzfeednews.com/article/jinamoore/cambodia-is-chinas-newest-market-for-foreign-brides>.

Muong, Vandy, and Audrey Wilson. 2016. “Jailing the China Bride ‘Traffickers.’” 2016. <https://www.phnompenhpost.com/post-weekend/jailing-china-bride-traffickers>.

Narim, Khuon. 2022. “Cambodia to Resume Sending Domestic Workers to Malaysia despite Lack of Action on Abuse Complaints | CamboJA News.” February 27, 2022. <https://cambojanews.com/cambodia-to-resume-sending-domestic-workers-to-malaysia-despite-lack-of-action-on-abuse-complaints/>.

Narin, Sun. 2020. “Cambodia Reports 111 Cases of Trafficked Brides to China Last Year.” VOA. 2020. <https://www.voacambodia.com/a/cambodia-reports-111-cases-of-trafficked-brides-to-china-last-year/5440833.html>.

NGO CEDAW. 2019. “CEDAW and Cambodia: Men Still Benefit from Double Standards | Heinrich Böll Stiftung.” Heinrich-Böll-Stiftung. 2019. <https://www.boell.de/en/2019/12/10/cedaw-and-cambodia-men-still-benefit-double-standards>.

- OECD and Cambodia Development Resource Institute. 2017. *Interrelations between Public Policies, Migration and Development in Cambodia*. OECD Development Pathways. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264273634-en>.
- Ouk, Ratanak. n.d. "An Overview of Cambodia-Thai Cooperation in Protecting Cambodian Migrant Workers in Thailand." *Uc Occasional Paper Series* 3: 14.
- Phnom Penh Post. 2017. "Deportation, Exploitation and Death at the Thai Border." 2017. <https://www.phnompenhpost.com/opinion/deportation-exploitation-and-death-thai-border>.
- Picarelli, John T. 2008. *Security Studies : An Introduction*. New York: Routledge.
- Ristanti, Destin Nurafiati. 2021. "Regional Governance Untuk Memerangi Kejahatan Terorganisir Transnasional: Kerja Sama Penanggulangan Perdagangan Manusia Di Subwilayah Mekong Raya Dalam Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT)." *Global and Policy Journal of International Relations* 8 (3). <https://doi.org/10.33005/jgp.v8i03.2389>.
- Sambath, Gechu. 2021. "Decentralization of Education Is the Solution to Close the Educational Gap in Cambodia." *Cambodian Education Forum* (blog). August 17, 2021. <https://cefcambodia.com/2021/08/17/decentralization-of-education-is-the-solution-to-close-the-educational-gap-in-cambodia/>.
- Sari, Betti Rosita. 2010. "The Human Trafficking of Cambodian Women and Children for Sex Industry." *Jurnal Kajian Wilayah* 1, No.2: 2.

- Sochan, Ry. 2019. "Child Protection Unit Forms Online Group to Fight Cyber Exploitation." 2019. <https://www.phnompenhpost.com/national/child-protection-unit-forms-online-group-fight-cyber-exploitation>.
- Sok, Serey. 2019. "Challenges and Constraints in Achieving Appropriate Working and Living Conditions for Cambodian Temporary Migrant Workers in Malaysia." *South East Asia Research* 27 (4): 361–77. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1699368>.
- Sokhean, Ben. 2016. "No Evidence of Child Labor at Brick Factories, Gov't Says." *The Cambodia Daily*. December 4, 2016. <https://english.cambodiadaily.com/news/no-evidence-child-labor-brick-factories-government-says-121475/>.
- Song, Jay. 2016. "Australia and the Anti-Trafficking Regime in Southeast Asia." 2016. <https://www.lowyinstitute.org/publications/australia-and-anti-trafficking-regime-southeast-asia>.
- Sony, Ouch, and Danielle Keeton-Olsen. 2020. "Risking Closed Borders, Migrant Workers Seek Work in Thailand to Pay Debts." *VOD* (blog). October 30, 2020. <https://vodenglish.news/risking-closed-borders-migrant-workers-seek-work-in-thailand-to-pay-debts/>.
- Sukhumvit. 2016. "Almost 70,000 Cambodian Migrant Workers Were Deported From Thailand In 2015 | WOS." 2016. <https://whatsonsukhumvit.com/almost-70000-cambodian-migrant-workers-were-deported-from-thailand-in-2015/>.
- Syah, Angelin Putri. 2020. "Kamboja mulai sidang massal aktivis oposisi."

<https://www.alinea.id/>. 2020. <https://www.alinea.id/dunia/kamboja-mulai-sidang-massal-aktivis-oposisi-b1ZXa9yPn>.

The ASEAN Post. 2019. "Cambodia's Paedophiles and the Internet." The ASEAN Post | Your Gateway To Southeast Asia's Economy. 2019. <https://theaseanpost.com/article/cambodias-paedophiles-and-internet>.

The Bangkok Post. 2016. "Profile: Cambodia's Private Paedophile Hunters." *Bangkok Post*, 2016. <https://www.bangkokpost.com/thailand/special-reports/970269/profile-cambodias-private-paedophile-hunters>.

The Straits Times. 2017. "Cambodian Women Rescued from Sex Slavery in Japan | The Straits Times." 2017. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/cambodian-women-rescued-from-sex-slavery-in-japan>.

———. 2017. "Cambodia PM Hun Sen Orders Closure of Child Sex Slave Charity over 'insulting' CNN Report." *The Straits Times*, August 1, 2017. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/cambodia-pm-hun-sen-orders-closure-of-child-sex-slave-charity-over-insulting-cnn-report>.

Ullah, AKM Ahsan, and Mallik Akram Hossain. 2011. "Gendering Cross-Border Networks in the Greater Mekong Subregion: Drawing Invisible Routes to Thailand." *ASEAS- Austrian Journal of South-East Asian Studies* 4 (2) (Borderland&Border Studies): 18.

UN-ACT. 2014. "Cambodia." *UN ACT* / (blog). 2014. <http://un-act.org/cambodia/>.

———. n.d. "United Nations Action for Cooperation against Trafficking in Persons 2017."

<https://www1.undp.org/content/dam/rbap/docs/Research%20&%20Publica>

tions/democratic_governance/RBAP-DG-2018-UN-ACT-Annual-Progress-Report-2017.pdf.

UNICEF. 2019. “Cambodia Celebrates 30 Years of Protecting Children's Rights with #everyright4everychild Campaign.” 2019. <https://www.unicef.org/cambodia/press-releases/cambodia-celebrates-30-years-protecting-childrens-rights-everyright4everychild>.

UNODC. 2004. “UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO.” *United Nations Office on Drugs and Crime* 04–56153: 92.

US Department of Labor. 2016. “2015 Findings on the Worst Forms of Child Labor.” Washington. https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2015/tda2015.pdf.

———. 2017. “2016 Findings on the Worst Forms of Child Labor.” Washington. <https://respect.international/wp-content/uploads/2017/09/2016-Findings-on-the-Worst-Forms-of-Child-Labor.pdf>.

———. 2019. “2018 Findings on The Worst Forms of Child Labor.” Washington. https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2018/ChildLaborReportBook.pdf.

———. 2020. “2019 Findings on the Worst Forms of Child Labor.” Washington.

US Department of State. 2020. “Cambodia.” *United States Department of State* (blog). 2020. <https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/cambodia/>.

U.S Embassy. 2015. "Cambodia." U.S. Department of State. July 28, 2015. //2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243409.htm.

———. 2016. "Cambodia Upgraded to Tier 2 Status in 2016 Trafficking in Persons Report." U.S. Embassy in Cambodia. July 1, 2016. <https://kh.usembassy.gov/cambodia-upgraded-tier-2-status-2016-trafficking-persons-report/>.

Vicheika, Kann. 2016. "UN Report Tells of Cambodian Women Forced to Marry in China." VOA. 2016. <https://www.voanews.com/a/un-report-tells-of-cambodian-women-forced-to-marry-in-china/3487679.html>.

Yunda, Angie Pratiwi Putro. 2020. "UPAYA INDONESIA DALAM MENANGGULANGI KASUS HUMAN TRAFFICKING DI SELAT MALAKA | Yunda | Padjadjaran Journal of International Relations." 2020. <http://jurnal.unpad.ac.id/padjir/article/view/24075>.